RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini akhirnya dapat diselesaikan. Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.

Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggaran 2024 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuannya sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan perubahan atas Renja 2024 tersebut.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) perubahan ini dapat digunakan sebagai acuan/Pedoman dalam penyusunan Perencanaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

H. Akhmad Nasa'i. S.Kep, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650328 198603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… ii

DAFTAR ISI…….. iii

BAB PENDAHULUAN…… 1
1.1 Latar Belakang……... 1
1.2 Landasan Hukum……... 3
1.3 Maksud dan Tujuan……... 5
1.4 Sistematika Penulisan……..... 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH…….. 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstras Perangkat Daerah…… 7
2.2 Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan…… 15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi……. 38

BAB III PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH…… 51
3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama SKPD ……...
3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan…….. 54
3.2 Rencana Perubahan Renja……. 54
3.3 Analisis Sosial Ekonomi……... 65

BAB IV PENUTUP…….. 70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian kondisi rill dan empiris DP3APPKBPMD Kabupaten Balangan, evaluasi renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap capaian Renstra Perangkat Daerah DP3APPKBPMD Kabupaten Balangan.

Renja perangkat daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program dan kegiatan tahunan ke dalam Langkah-langkah yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran operasional untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kualitas dokumen Renja

Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan timpenyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja perangkat daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan yang mengacu pada Review Renstra dan Evaluasi Hasil Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024 adalah:

1. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini;
2. Perubahan karena adanya varian SILPA;
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
4. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

5. Adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan 2013-2032;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.(Berita Daerah Kabupaten Balangan nomor 25 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabaupaten Balangan serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan capaian target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76.52 persen	68.119.760.052	0 persen	0	76.49 persen	11.051.494.307	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	8.298.251.832	100 persen	8.298.251.832	130.74	75.09	100 persen	8.298.251.832	130.68	12.18		174%
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		100 Persen		100 Persen		100	0	100 Persen		100			
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penggganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 Persen	532.618.049	0 Persen	0	100 Persen	91.377.300	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	265.005.400	100 Persen	265.005.400	100	290.01	100 Persen	265.005.400	100	49.76		34%
1	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	340.926.506	0 Dokumen	0	2 Dokumen	58.554.300	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	142.700.000	2 Dokumen	142.700.000	100	243.71	2 Dokumen	142.700.000	100	41.86		41%
2	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	2 Dokumen	191.691.543	0 Dokumen	0	2 Dokumen	32.823.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	122.305.400	2 Dokumen	122.305.400	100	372.62	2 Dokumen	122.305.400	100	63.8		27%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100	308.17			100	52.83		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	53.085.700.800	0 persen	0	100 persen	8.587.359.244	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	8.033.246.432	100 persen	8.033.246.432	100	93.55	100 persen	8.033.246.432	100	15.13		107%
3	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundangundangan	100 persen	52.648.381.888	0 persen	0	100 persen	8.507.559.244	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	8.033.246.432	100 persen	8.033.246.432	100	94.42	100 persen	8.033.246.432	100	15.26		106%
4	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen	293.652.500	0 persen	0	100 persen	52.500.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
5	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	12 Dokumen	143.666.412	0 Dokumen	0	12 Dokumen	27.300.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		33.33	31.47			100	15.26		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.129.974.820	0 persen	0	100 persen	202.020.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
6	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	550 stell	1.129.974.820	0 stell	0	110 stell	202.020.000	0 stell	0	0 stell	0	0 stell	0	0 stell	0	0 stell	0	0	0						
			Jumlah kain sasirangan yang diadakan	550 lembar		0 lembar		110 lembar		0 lembar		0 lembar		0 lembar		0 lembar		0 lembar		0	0						
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0	0			0	0		
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	2.658.577.703	0 persen	0	100 persen	407.464.470	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
7	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100 persen	103.101.255	0 persen	0	100 persen	16.514.190	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
8	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	535 buah	239.622.243	0 buah	0	100 buah	36.558.165	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0						
9	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2560 dokumen	61.781.280	0 dokumen	0	480 dokumen	10.080.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0						
10	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	2.254.072.925	0 Laporan	0	100 Laporan	344.312.115	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0						
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0	0			0	0		
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100 persen	2.191.045.254	0 persen	0	100 persen	391.721.084	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
11	2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	100 persen	1.095.522.627	0 persen	0	100 persen	195.860.542	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
12	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 persen	1.095.522.627	0 persen	0	100 persen	195.860.542	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	0	0			0	0		
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	6.117.135.922	0 Bulan	0	12 Bulan	979.831.125	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0 Bulan	0	0	0						
13	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	2.283.684.772	0 persen	0	100 persen	367.920.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
14	2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 Laporan	356.390.477	0 Laporan	0	100 Laporan	48.877.500	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64 bulan	3.477.060.673	0 bulan	0	12 bulan	563.033.625	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
16	2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	1.104.234.030	0 unit	0	100 unit	195.860.542	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0						
17	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1.300.473.474	0 Unit	0	100 Unit	195.860.542	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		33.33	63.93			100	32.45		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten**	**30 persen**	**1.039.755.000**	**0 persen**	**0**	**21.5 persen**	**1.005.000.000**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0**	**0**						
			indeks pembangunan gender (IPG)	92.86 nilai		0 nilai		92.77 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0	0						
			indeks pemberdayaan gender (IDG)	76 nilai		0 nilai		73.02 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0 nilai		0	0						
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah di latih PUG	182 Lembaga	116.185.319	0 Lembaga	0	30 Lembaga	87.291.750	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0						
18	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Peanganggaran yang responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten / kota	50 Perangkat Daerah	97.681.757	0 Perangkat Daerah	0	45 Perangkat Daerah	73.389.750	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0						
19	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan PUG	200 Laporan	18.503.562	0 Laporan	0	200 Laporan	13.902.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3 Organisasi	923.569.681	0 Organisasi	0	3 Organisasi	917.708.250	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0					
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Jdokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum soial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	150 Dokumen	23.569.681	0 Dokumen	0	150 Dokumen	17.708.250	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum soial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	3 Organisasi	900.000.000	0 Organisasi	0	3 Organisasi	900.000.000	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**100 Persen**	**90.984.698**	**0 Persen**	**0**	**100 Persen**	**96.582.950**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**26.524.809**	**0 Persen**	**26.524.809**	**0**	**27.46**		**26.524.809**		**29.15**		
	Jumlah perempuan kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan	0 Orang		0 Orang		4 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		0	0						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	26 desa	58.082.178	0 desa	0	4 desa	43.638.000	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0	0					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	400 Perangkat Daerah	58.082.178	0 Perangkat Daerah	0	264 Perangkat Daerah	43.638.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah ter standarlisasi	16 Orang	32.902.520	0 Orang	0	2 Orang	52.944.950	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	26.524.809	0 Orang	26.524.809	0	50.1		26.524.809		80.62		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 persen	32.902.520	0 persen	0	100 persen	52.944.950	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	26.524.809	0 persen	26.524.809	0	50.1		26.524.809		80.62		
			Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan tingkat kabupaten	12 Orang		0 Orang		4 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		4 Orang		4 Orang		100	0	4 Orang		33.33			
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50	50.1			33.33	80.62		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	25.05			0	80.62		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase perempuan ber umur 20-24 tahun yang pernah kawin umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun**	**17.86 persen**	**510.896.100**	**0 persen**	**0**	**16.56 persen**	**176.335.000**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**6.08 persen**	**99.803.100**	**6.08 persen**	**99.803.100**	**36.71**	**56.6**	**6.08 persen**	**99.803.100**	**34.04**	**19.53**		**65%**
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mew ujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas keluarga	65 persen	139.755.000	0 persen	0	62 persen	105.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	82.99 persen	99.803.100	82.99 persen	99.803.100	133.85	95.05	82.99 persen	99.803.100	127.68	71.41		141%
24	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	139.755.000	0 dokumen	0	1 dokumen	105.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	99.803.100	1 dokumen	99.803.100	100	95.05	1 dokumen	99.803.100	100	71.41		105%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		100	95.05			100	71.41		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	2.08.04.2.03	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mew ujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Puspaga	86 persen	371.141.100	0 persen	0	79 persen	71.335.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						

25	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mew ujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mew ujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang w ilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia	18 layanan	371.141.100	0 layanan	0	3 layanan	71.335.000	0 layanan	0	0 layanan	0	0 layanan	0	0 layanan	0	0 layanan	0	0	0							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		66.93	47.53			127.68	71.41		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender**	**100 Dokumen**	**131.991.610**	**0 Dokumen**	**0**	**100 Dokumen**	**99.167.250**	**0 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0**	**0 Dokumen**	**0**	**100 Dokumen**	**34.919.200**	**100 Dokumen**	**34.919.200**	**100**	**35.21**	**100 Dokumen**	**34.919.200**	**100**	**26.46**		**284%**
			Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikew enangan kabupaten/kota	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0						
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1 Dokumen	131.991.610	0 Dokumen	0	1 Dokumen	99.167.250	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	34.919.200	1 Dokumen	34.919.200	100	35.21	1 Dokumen	34.919.200	100	26.46		284%
26	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	122 dokumen	87.926.858	0 dokumen	0	122 dokumen	66.060.750	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	34.919.200	1 dokumen	34.919.200	0.82	52.86	1 dokumen	34.919.200	0.82	39.71		2%
27	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kekerasan perempuan dan anak yang di verifikasi, jumlah dokumen data pelaporan E-Kekerasan SIMPONI PPA yang telah tersaji di w ebsite	12 Dokumen	44.064.752	0 Dokumen	0	12 Dokumen	33.106.500	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0.41	26.43			0.82	39.71		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		100	35.21			100	26.46		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**IPA (Indeks Perlindungan Anak)**	**64 indeks**	**281.837.461**	**0 indeks**	**0**	**61.23 indeks**	**217.587.000**	**0 indeks**	**0**	**0 indeks**	**0**	**0 indeks**	**0**	**0 indeks**	**156.212.200**	**0 indeks**	**156.212.200**	**0**	**71.79**		**156.212.200**		**55.43**		
			Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	658		0		653		0		0		0		0		0		0	0						
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kew enangan Kabupaten/Kota	Pesentase desa layak anak	5 persen	126.591.618	0 persen	0	4 persen	100.281.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	89.531.200	0 persen	89.531.200	0	89.28		89.531.200		70.72		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
28	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usahayang Mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	48 organisasi	95.000.000	0 organisasi	0	48 organisasi	76.545.750	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	3 organisasi	89.531.200	3 organisasi	89.531.200	6.25	116.96	3 organisasi	89.531.200	6.25	94.24		5%
29	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.591.618	0 Dokumen	0	21 Dokumen	23.735.250	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		3.13	58.48			6.25	94.24		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan	100 persen	155.245.843	0 persen	0	100 persen	117.306.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	4 persen	66.681.000	4 persen	66.681.000	4	56.84	4 persen	66.681.000	4	42.95		7%
30	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	314 orang	27.105.482	0 orang	0	314 orang	20.364.750	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0						
31	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kew enangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	74.461.464	0 Dokumen	0	6 Dokumen	55.944.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.765.000	1 Dokumen	50.765.000	16.67	90.74	1 Dokumen	50.765.000	12.5	68.18		18%
32	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	34.044.318	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.578.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0						
33	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kew enangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	19.634.579	0 Dokumen	0	35 Dokumen	15.419.250	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.916.000	1 Dokumen	15.916.000	2.86	103.22	1 Dokumen	15.916.000	2.86	81.06		3%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		4.88	48.49			7.68	74.62		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		2	73.06			4	56.84		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sedang		

7	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara konprehensif**	**100 persen**	**90.999.914**	**0 persen**	**0**	**100 persen**	**119.417.100**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**80.702.926**	**0 persen**	**80.702.926**	**0**	**67.58**		**80.702.926**		**88.68**		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa yang bekerjasama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekw ersan terhadap anak	4 buah	19.276.510	0 buah	0	2 buah	10.000.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	17.346.200	0 buah	17.346.200	0	173.46		17.346.200		89.99		
34	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memeperoleh Advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	300 orang	19.276.510	0 orang	0	10 orang	10.000.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	150 orang	17.346.200	150 orang	17.346.200	1	173.46	150 orang	17.346.200	50	89.99		1%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		1	173.46			50	89.99		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	82 nilai	42.073.904	0 nilai	0	80 nilai	109.417.100	0 nilai	0	0 nilai	0	0 nilai	0	0 nilai	53.230.326	0 nilai	53.230.326	0	48.65		53.230.326		126.52		
35	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	100 Orang	42.073.904	0 Orang	0	100 Orang	109.417.100	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	53.230.326	0 Orang	53.230.326	0	48.65		53.230.326		126.52		
			Jumlah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan	18 Orang		0 Orang		8 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang		8 Orang		8 Orang		100	0	8 Orang		44.44		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		50	48.65			44.44	126.52		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 lembaga	29.649.500	0 lembaga	0	4 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	10.126.400	0 lembaga	10.126.400	0							
36	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100 Orang	29.649.500	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	10.126.400	50 Orang	10.126.400								

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	111.06			0	108.26		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
8	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaaan**	**1 kerjasama**	**125.000.000**	**0 kerjasama**	**0**	**1 kerjasama**	**110.000.000**	**0 kerjasama**	**0**	**0 kerjasama**	**0**	**0 kerjasama**	**0**	**0 kerjasama**	**0**	**0 kerjasama**	**0**	**0**	**0**						
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya kerja sama antar desa	1 kerjasama	125.000.000	0 kerjasama	0	1 kerjasama	110.000.000	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0	0						
37	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	8 kerjasama	125.000.000	0 kerjasama	0	2 kerjasama	110.000.000	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0	0						
39	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 kerjasama	0	0 kerjasama	0	1 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0	0							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu**	**100 Persen**	**52.907.734.800**	**0 Persen**	**0**	**85 Persen**	**12.087.820.000**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**0**	**85 Persen**	**705.314.000**	**85 Persen**	**705.314.000**	**100**	**5.83**	**85 Persen**	**705.314.000**	**85**	**1.33**		**1715%**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa	52.907.734.800	0 Desa	0	154 Desa	12.087.820.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	154 Desa	705.314.000	154 Desa	705.314.000	100	5.83	154 Desa	705.314.000	100	1.33		1715%
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	154 Desa		0 Desa		154 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa		154 Desa		154 Desa		100	0	154 Desa		100			
			Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	100 persen		0 persen		94 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0	0						
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100 persen		0 persen		90 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0	0						
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	95 persen		0 persen		80 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0 persen		0	0						
40	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminanan kesehatannya	100 persen	8.381.989.000	0 persen	0	94 persen	1.552.320.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
41	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	924 Desa	26.886.719.900	0 Desa	0	154 Desa	6.197.910.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	154 Desa	33.754.800	154 Desa	33.754.800	100	0.54	154 Desa	33.754.800	16.67	0.13		18519%
42	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154 Desa	1.087.725.000	0 Desa	0	154 Desa	200.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	154 Desa	179.584.800	154 Desa	179.584.800	100	89.79	154 Desa	179.584.800	100	16.51		111%

43	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Desa yang Menetapkan Pertanggung jawaban APBDes Tepat Waktu	95 dokumen	3.457.740.000	0 dokumen	0	80 dokumen	550.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	440.339.600	4 dokumen	440.339.600	5	80.06	4 dokumen	440.339.600	4.21	12.73		6%
44	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	154 Desa	287.910.000	0 Desa	0	154 Desa	59.590.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0						
45	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	154	10.105.374.900	0	0	29	2.978.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terwujudnya Database Perangkat Desa Se- Kabupaten Balangan	154 Desa	320.000.000	0 Desa	0	154 Desa	80.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0						
47	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	100 dokumen	1.123.670.000	0 dokumen	0	100 dokumen	200.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	51.634.800	4 dokumen	51.634.800	4	25.82	4 dokumen	51.634.800	4	4.6		15%
48	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang selesai Penetapan Batas Desa	21 Desa	700.000.000	0 Desa	0	5 Desa	150.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0						
49	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 Desa	556.606.000	0 Desa	0	9 Desa	120.000.000	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		20.9	19.62			31.22	8.49		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		40	5.83			100	1.33		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
10	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu**	**100 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**85 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0**							
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
11	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang**	**70 persen**	**5.838.905.000**	**0 persen**	**0**	**55 persen**	**5.674.303.700**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**70 persen**	**675.734.300**	**70 persen**	**675.734.300**	**127.27**	**11.91**	**70 persen**	**675.734.300**	**100**	**11.57**		**1069%**

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	60 Dokumen	5.838.905.000	0 Dokumen	0	10 Dokumen	5.674.303.700	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	675.734.300	0 Dokumen	675.734.300	0	11.91		675.734.300		11.57		
			Jumlah Posyantek di desa	60 desa		0 desa		45 desa		0 desa		0 desa		0 desa		0 desa		0 desa		0	0						
50	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	156 Orang	274.200.000	0 Orang	0	76 Orang	573.200.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang	675.734.300	1 Orang	675.734.300	1.32	117.89	1 Orang	675.734.300	0.64	246.44		1%
			Jumlah Kader Posyandu yang terampil	164		0		164		0		0		0		0		0		0	0						
			Jumlah LPM dibina	164 Lembaga		0 Lembaga		164 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga		0	0						
			Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	56 Desa		0 Desa		45 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa		0 Desa		0	0						
51	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	112 Bumdes	3.885.305.000	0 Bumdes	0	70 Bumdes	3.506.180.000	0 Bumdes	0	0 Bumdes	0	0 Bumdes	0	0 Bumdes	0	0 Bumdes	0	0	0						
52	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	55	279.400.000	0	0	45	266.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	3 Buah		0 Buah		3 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0	0						
53	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa,Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165 TP PKK	1.400.000.000	0 TP PKK	0	165 TP PKK	1.328.223.700	0 TP PKK	0	0 TP PKK	0	0 TP PKK	0	0 TP PKK	0	0 TP PKK	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0.17	29.47			0.64	246.44		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	11.91			0	11.57		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

13	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga	62.44 persen	5.389.307.355	0 persen	0	58.2 persen	3.019.743.100	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	58.11 persen	16.121.710.000	58.11 persen	16.121.710.000	99.85	533.88	58.11 persen	16.121.710.000	93.07	299.14		19%
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga	62 Persen	1.360.893.512	0 Persen	0	58 Persen	297.260.500	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	62 Persen	16.121.710.000	62 Persen	16.121.710.000	106.9	5	62 Persen	16.121.710.000	100	1		2138%
			Jumlah Regulasi Daerah / Dokumen Perencanaan Yang Memanfaatkan GDPK	6 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0	0						
54	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	348.154.092	0 Dokumen	0	4 Dokumen	158.738.900	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	16.121.710.000	4 Dokumen	16.121.710.000	100	10	4 Dokumen	16.121.710.000	400	4		1000%
55	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	214.500.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	66.126.600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0					
56	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	13 satuan pendidikan	457.377.580	0 satuan pendidikan	0	8 satuan pendidikan	72.395.000	0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	0	0					
57	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	3 organisasi	340.861.840	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0							
																				33.33	3.33			400	4		
																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100 persen	4.028.413.843	0 persen	0	100 persen	2.722.482.600	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
58	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	36 Laporan	3.194.530.196	0 Laporan	0	12 Laporan	2.640.107.600	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
59	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Yang Di Bentuk	214 Rumah Dataku	427.752.000	0 Rumah Dataku	0	15 Rumah Dataku	82.375.000	0 Rumah Dataku	0	0 Rumah Dataku	0	0 Rumah Dataku	0	0 Rumah Dataku	0	0 Rumah Dataku	0	0	0						
60	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	24 Laporan	406.131.647	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0								
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		35.63	2.5			100	1		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
14	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)**	**77.5 persen**	**388.000.000**	**0 persen**	**0**	**76.5 persen**	**320.000.000**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**77.5 persen**	**725.417.529**	**77.5 persen**	**725.417.529**	**101.31**	**226.69**	**77.5 persen**	**725.417.529**	**100**	**186.96**		**45%**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB	8 Laporan	265.000.000	0 Laporan	0	3 Laporan	235.000.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	8 Laporan	537.179.524	8 Laporan	537.179.524	266.67	228.59	8 Laporan	537.179.524	100	202.71		117%
61	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) disetiap desa/kelurahan	1 rasio	200.000.000	0 rasio	0	1 rasio	185.000.000	0 rasio	0	0 rasio	0	0 rasio	0	1 rasio	463.056.324	1 rasio	463.056.324	100	250.3	1 rasio	463.056.324	100	231.53		40%
62	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase kecamatan yang melaksanakan RAKORCAMMINLOK	50 persen	65.000.000	0 persen	0	30 persen	50.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	74.123.200	100 persen	74.123.200	333.33	148.25	100 persen	74.123.200	200	114.04		225%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		216.67	199.28			150	172.79		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	123.000.000	0 persen	0	100 persen	85.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	188.238.005	100 persen	188.238.005	100	221.46	100 persen	188.238.005	100	153.04		45%
63	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnnya	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	60 persen	50.000.000	0 persen	0	30 persen	35.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	148.660.005	100 persen	148.660.005	333.33	424.74	100 persen	148.660.005	166.67	297.32		78%
64	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	220 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0							
65	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pembentukaan TIM KB Kelling	60 unit	25.000.000	0 unit	0	10 unit	15.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					
66	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase akseptor KB MKJP yang mendapat pembinaan pasca pelayanan	8.41 persen	48.000.000	0 persen	0	8.3 persen	35.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	39.578.000	100 persen	39.578.000	1	113.08	100 persen	39.578.000	1	82.45		1%
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	111.44	179.27			83.84	189.89		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																	183.34	225.03			100	177.88		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
15	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)**	**14 Orang**	**106.000.000**	**0 Orang**	**0**	**17 Orang**	**240.000.000**	**0 Orang**	**0**	**0 Orang**	**0**	**0 Orang**	**0**	**0 Orang**	**0**	**0 Orang**	**0**	**0**	**0**					
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	21.88 persen	0	0 persen	0	19.94 persen	155.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0					
67	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	35.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
68	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	0 Kader	0	0 Kader	0	20 Kader	40.000.000	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0	0					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai DenganTahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenTahun Berjalan 2023 yangdievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	17=K13/Rp13x100%
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
69	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kader	0	0 Kader	0	504 Kader	20.000.000	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0 Kader	0	0	0						
70	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	8 Kelompok	40.000.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0	0						
71	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	165 Kelompok	20.000.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	100 Persen	106.000.000	0 Persen	0	100 Persen	85.000.000	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0						
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	0.69 Persen		0 Persen		0.7 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0	0						
72	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	75 persen	38.000.000	0 persen	0	58.45 persen	30.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						

73	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/Mahasiswa	100 persen	68.000.000	0 persen	0	70 persen	55.000.000	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0	0	0						
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																		0	0			0	0		
		Predikat Kinerja (Kegiatan)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)																		**39.79**	**85.54**			**92.85**	**73.04**		
		Predikat Kinerja (Seluruh Program)																		**Rendah**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)																		**32.69**	**54.04**			**93.17**	**67.37**		
		Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**		
		Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																		**22.74**	**40.33**			**73.49**	**84.88**		
		Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																		**Sangat Rendah**	**Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		Jumlah Anggaran dari seluruh Program							**34.217.450.407**							**26.924.589.896**		**26.924.589.896**								

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	1. Dukungan dana APBD yang selalu tersedia tiap tahun karena komitmen kepala daerah beserta DPRD dalam memastikan seluruh penduduk Kabupaten Balangan memiliki jaminan kesehatan. 2. Cakupan UHC dan Keaktifan Peserta di Kabupaten Balangan. 3. Terpenuhinya 9 jenis tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar. 3. Tersedianya regulasi/Peraturan Bupati Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cakupan Semesta Program JKN Kabupaten Balangan 4. Pemberian Insentif yang lebih besar dibanding daerah biasa 5. Penyediaan sarana dan prasarana bagi bidan didesa 6. Penyediaan kendaraan operasional 7. RSUD Balangan Menawarkan gajih untuk tenaga dokter spesialis kontrak dan tunjangan untuk dokter spesialis PNS yang lebih besar jika dibanding dengan daerah lain disekitarnya 8. RSUD Balangan menyediakan sarana dan prasarana rumah dinas untuk tenaga dokter spesialis 3. Dokter spesialis RSUD Balangan mendapatkan mobil dinas + BBM guna menunjang pelayanan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan anastesi terhadap masyarakat Balangan yang membutuhkan 9. Dukungan dana APBD yang selalu tersedia tiap tahun dalam peningkatan kompetensi bidan melalui Pelaksanaan Pelatihan APN Bagi Bidan yang bekerja sama dengan P2KS 10. Tersedianya Perundang-undangan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 25 yang menjelaskan tentang pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan pendidkan / pelatihan 11. Tersedianya anggaran untuk pembangunan poskesdes ambakiang, lampihong kanan 12. Sudah tersedianya nya pmt ibu hamil Kek, ibu hamil Anemia, Balita kurus, Baik berupa biskuit dan susu serta PMT pangan lokal memalui Dana DAK Puskesmas, Distribusi PMT telur dari Propinsi Kalimantan Selatan untuk Balita gizi kurang. Adanya PMT dari dana Desa dan dukungan dari CSR. PT Adaro indonesia untuk 40 desa lokus binaan Adaro Group. Dilakukannya surveilans gizi, intervensi dan evaluasi baik dari Dinas kesehatan,PPKb dan jajarannya serta pihak ke 3 13. Adanya dukungan berupa anggaran untuk sosialisasi yang berasal dari berbagai sumber (APBD, DAK, Dana Desa dan sumber pembiayaan lain), dukungan kebijakan dari pemerintah daerah berupa Perbup/SK/edaran terkait peningkatan pola hidup bersih dan sehat di Kabupaten Balangan 14. Sudah tersedianya masterplan pengembangan RSUD Balangan, 15. Sudah tersedianya lahan yang akan digunakan untuk pengembangan RSUD Balangan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	1. Masih adanya Peserta BPJS yang tidak aktif walaupun sudah terdaftar. 2. Pelayanan Kesehatan khususnya masyarakat tidak mampu sudah tercover melalui pembiayaan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah, namun terkait biaya pendamping pada pasien kasus rujukan (keluarga) sering kali menjadi polemik karena keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga pasien yang seharusnya dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan memilih untuk tidak dirujuk, yang mempengaruhi pelayanan komprehensif tidak terlaksananya dengan baik (tidak tuntas) 3. Adanya tenaga bidan yang tidak ingin di tempatkan sebagai bidan desa 4. RSUD Balangan sudah memiliki dua orang dokter spesialis anestesi namun tidak berstatus tetap 5. Lokasi RSUD Balangan yang jauh dari perkotaan sehingga menurunkan minat dari dokter spesialsi 6. Sulitnya merekrut Dokter Spesialis Anestesi dikarenakan SDM yang masih terbatas (SDM yang memiliki keahlian khusus) 7. Pendanaan yang terbatas membuat tidak semua bidan dapat mengikuti kompetensi yang dilaksanakan 8. Pembangunan poskesdes lampihong kanan dan poskesdes ambakiang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.dikarenakan ketidaksiapan pelaksana lapangan untuk memulai pekerjaan, dari pekerja bangunan sampai dengan material yang dibutuhkan masih belum siap. Sehingga progres kemajuan fisiknya tidak sesuai dengan realisasi progres per minggunya 9. Tidak semua ibu hamil dengan anemia berat dan sedang serta ibu hamil KEK mendapat PMT susu, jumlah ibu hamil Anemia berat dan sedang sampai dengan TW 4 yaitu 82 orang dan ibu hamil KEK 269 orang, sedang jumlah pmt susu ibu hamil Anemia 327 paket. Untuk jumlah balita gizi kurus 687 orang sedang paket pmt balita susu 322 paket 10. Tingkat konsumsi ibu hamil terhadap pmt yang di berikan belum maksimal, di karenakan beberapa alasan kodisi pada saat hamil 11. Ada Balita yang tidak bisa minum susu 12. Tingkat pengetahuan orang tua dalam pengeolahan PMT Susu 13. Sebagian orang tua menjadikan PMT sebagai makanan utama bukan makanan tambahan sehingga status gizinya tidak ada perubahan 14. Adanya penyakit penyerta pada balita. 15. Pola hidup bersih dan sehat adalah sebuah perilaku yang tentu saja tidak mudah untuk langsung diterapkan. Hal ini sangat terkait dengan kebiasaan dan budaya di suatu daerah. Walaupun perilaku berasal dari diri sendiri namun dapat mempengaruhi kebiasaan di suatu kelompok masyarakat. Tidak semua daerah memiliki sarana/prasarana sanitasi yang baik dan standar juga bisa membuat masyarakat masih melalukan pola hidup yang tidak sehat seperti BAB dan membuang sampah sembarangan 16. Kondisi tanah/lahan yang tidak rata, 2. Kurangnya dana yang bersumber baik BLUD, APBD dan DAK

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Nilai Efisiensi
		I		II		III		IV														
3	4	5		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		17=K13/Rp 13x100%
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**76.52 persen**	**65.715.052.548**	**76.5 persen**	**11.407.957.827**	**25 persen**	**1.203.245.275**	**50 persen**	**4.672.606.342**					**50 persen**	**4.672.606.342**	**65.36**	**40.96**	**50 persen**	**12.970.858.174**	**65.34**	**19.74**	**160%**
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen		100 Persen		25 Persen		50 Persen						50 Persen		50	0	50 Persen		50		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran, dan	100 Persen	532.618.049	100 Persen	100.515.030	25 Persen	24.209.200	50 Persen	87.709.300					50 Persen	87.709.300	50	87.26	50 Persen	352.714.700	50	66.22	57%

Perangkat Daerah	evaluasi perangkat daerah yang baik																			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	340.926.506	2 Dokumen	64.409.730	1 Dokumen	11.725.700	2 Dokumen	45.514.500					2 Dokumen	45.514.500	100	70.66	4 Dokumen	188.214.500	200	55.21	142%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	2 Dokumen	191.691.543	2 Dokumen	36.105.300	1 Dokumen	12.483.500	2 Dokumen	42.194.800					2 Dokumen	42.194.800	100	116.87	4 Dokumen	164.500.200	200	85.82	86%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																100	93.77			200	70.52	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	53.085.700.800	100 persen	8.701.019.129	25 persen	846.975.378	59.87 persen	3.056.153.061					59.87 persen	3.056.153.061	59.87	35.12	59.87 persen	11.089.399.493	59.87	20.89	170%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundangundangan	100 persen	52.648.381.888	100 persen	8.594.603.129	25 persen	819.041.378	50 persen	2.997.058.061					50 persen	2.997.058.061	50	34.87	50 persen	11.030.304.493	50	20.95	143%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100 persen	293.652.500	100 persen	63.406.000	25 persen	17.454.000	50 persen	35.364.000					50 persen	35.364.000	50	55.77	50 persen	35.364.000	50	12.04	90%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	12 Dokumen	143.666.412	12 Dokumen	43.010.000	3 Dokumen	10.480.000	6 Dokumen	23.731.000					6 Dokumen	23.731.000	50	55.18	6 Dokumen	23.731.000	50	16.52	91%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																50	48.61			50	16.5	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.129.974.820	100 persen	279.500.000	25 persen	59.000.000	70 persen	205.000.000					70 persen	205.000.000	70	73.35	70 persen	205.000.000	70	18.14	95%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	550 stell	1.129.974.820	118 stell	279.500.000	118 stell	59.000.000	318 stell	205.000.000					318 stell	205.000.000	269.49	73.35	318 stell	205.000.000	57.82	18.14	367%
	Jumlah kain sasirangan yang diadakan	550 lembar		118 lembar		118 lembar		118 lembar						118 lembar		100	0	118 lembar		21.45		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																184.75	73.35			39.64	18.14	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	2.658.577.703	100 persen	921.235.481	25 persen	149.994.700	67.21 persen	848.993.237					67.21 persen	848.993.237	67.21	92.16	67.21 persen	848.993.237	67.21	31.93	73%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100 persen	103.101.255	100 persen	13.652.000	100 persen	13.652.000	214 persen	29.295.000					214 persen	29.295.000	214	214.58	214 persen	29.295.000	214	28.41	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	535 buah	239.622.243	100 buah	40.213.981	1 buah	8.400.000	11 buah	65.760.000					11 buah	65.760.000	11	163.53	11 buah	65.760.000	2.06	27.44	7%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2560 dokumen	61.781.280	4 dokumen	5.098.800	4 dokumen	5.098.800	4 dokumen	10.197.600					4 dokumen	10.197.600	100	200	4 dokumen	10.197.600	0.16	16.51	50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan terselenggarannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	2.254.072.925	4 Laporan	862.270.700	4 Laporan	122.843.900	24 Laporan	743.740.637					24 Laporan	743.740.637	600	86.25	24 Laporan	743.740.637	24	33	696%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																231.25	166.09			60.06	26.34	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan sarana dan	100 persen	2.191.045.254	100 persen	0	25 persen	0	65.36 persen	0					65.36 persen	0	65.36		65.36 persen		65.36		

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prasarana yang diadakan																				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	100 persen	1.095.522.627	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0					0 persen	0							
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100 persen	1.095.522.627	0 persen	0	0 persen	0	0 persen	0					0 persen	0							
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0	0			0	0	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	6.117.135.922	12 Bulan	1.405.688.187	12 Bulan	123.065.997	18 Bulan	474.750.744					18 Bulan	474.750.744	150	33.77	18 Bulan	474.750.744	28.13	7.76	444%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	2.283.684.772	100 persen	404.712.000	4 persen	29.971.633	43 persen	121.801.664					43 persen	121.801.664	43	30.1	43 persen	121.801.664	43	5.33	143%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 Laporan	356.390.477	4 Laporan	381.639.200	1 Laporan	44.657.700	11 Laporan	60.129.200					11 Laporan	60.129.200	275	15.76	11 Laporan	60.129.200	11	16.87	1745%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64 bulan	3.477.060.673	12 bulan	619.336.987	3 bulan	48.436.664	8 bulan	292.819.880					8 bulan	292.819.880	66.67	47.28	8 bulan	292.819.880	12.5	8.42	141%

Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															128.22	31.05			22.17	10.21	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															77.07	64.33			56.76	28.99	
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten**	**30 persen**	**1.039.755.000**	**30 persen**	**1.328.695.100**	**0 persen**	**631.919.216**	**0 persen**	**767.026.216**					**0 persen**	**767.026.216**	**0**	**57.73**		**767.026.216**		**73.77**	
	indeks pembangunan gender (IPG)	92.86 nilai		92.8 nilai		0 nilai		0 nilai						0 nilai		0	0					
	indeks pemberdayaan gender (IDG)	76 nilai		74.04 nilai		0 nilai		0 nilai						0 nilai		0	0					
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah di latih PUG	182 Lembaga	116.185.319	32 Lembaga	181.026.000	0 Lembaga	26.555.016	32 Lembaga	106.393.216					32 Lembaga	106.393.216	100	58.77	32 Lembaga	106.393.216	17.58	91.57	170%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk Perencanaan Peanganggaran yang responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten / kota	50 Perangkat Daerah	97.681.757	32 Perangkat Daerah	119.106.000	0 Perangkat Daerah	22.651.016	32 Perangkat Daerah	74.989.216					32 Perangkat Daerah	74.989.216	100	62.96	32 Perangkat Daerah	74.989.216	64	76.77	159%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan singkronisasi penyelenggaraan PUG	200 Laporan	18.503.562	6 Laporan	61.920.000	1 Laporan	3.904.000	2 Laporan	31.404.000					2 Laporan	31.404.000	33.33	50.72	2 Laporan	31.404.000	1	169.72	66%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																66.67	56.84			32.5	123.25	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh	3 Organisasi	923.569.681	3 Organisasi	1.147.669.100	2 Organisasi	605.364.200	2 Organisasi	660.633.000					2 Organisasi	660.633.000	66.67	57.56	2 Organisasi	660.633.000	66.67	71.53	116%

Kewenangan Kabupaten/Kota	pemerintah kabupaten																				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Jdokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum soial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	150 Dokumen	23.569.681	6 Dokumen	97.669.300	0 Dokumen	0	2 Dokumen	35.633.300					2 Dokumen	35.633.300	33.33	36.48	2 Dokumen	35.633.300	1.33	151.18	91%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum soial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	3 Organisasi	900.000.000	3 Organisasi	1.049.999.800	2 Organisasi	605.364.200	2 Organisasi	624.999.700					2 Organisasi	624.999.700	66.67	59.52	2 Organisasi	624.999.700	66.67	69.44	112%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																50	48			34	110.31	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																83.34	58.17			42.13	81.55	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat	Tinggi			Rendah	Sangat	

																Tinggi				Tinggi	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio kekerasan terhadap perempuan TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**100 Persen**	**90.984.698**	**13.8 Persen**	**169.021.465**	**0 Persen**	**15.242.000**	**0 Persen**	**20.192.000**					**0 Persen**	**20.192.000**	**0**	**11.95**		**46.716.809**		**51.35**	
	Jumlah perempuan kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan	0 Orang		0 Orang		0 Orang		0 Orang						0 Orang			0					
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	26 desa	58.082.178	5 desa	101.229.300	1 desa	10.212.000	1 desa	10.212.000					1 desa	10.212.000	20	10.09	1 desa	10.212.000	3.85	17.58	198%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten kota	400 Perangkat Daerah	58.082.178	12 Perangkat Daerah	101.229.300	0 Perangkat Daerah	10.212.000	0 Perangkat Daerah	10.212.000					0 Perangkat Daerah	10.212.000	0	10.09		10.212.000		17.58	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0	10.09			0	17.58	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah ter standarilisasi	16 Orang	32.902.520	6 Orang	67.792.165	0 Orang	5.030.000	0 Orang	9.980.000					0 Orang	9.980.000	0	14.72		36.504.809		110.95	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 persen	32.902.520	100 persen	67.792.165	0 persen	5.030.000	0 persen	9.980.000					0 persen	9.980.000	0	14.72		36.504.809		110.95	
	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan tingkat kabupaten	12 Orang		8 Orang		3 Orang		3 Orang						3 Orang		37.5	0	7 Orang		58.33		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																18.75	14.72			58.33	110.95	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																10	12.41			3.85	64.27	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase perempuan ber umur 20-24 tahun yang pernah kawin umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun**	**17.86 persen**	**510.896.100**	**15.76 persen**	**315.187.700**	**0 persen**	**42.557.816**	**0 persen**	**93.950.616**					**0 persen**	**93.950.616**	**0**	**29.81**		**193.753.716**		**37.92**	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kualitas keluarga	65 persen	139.755.000	63 persen	128.113.400	0 persen	13.109.000	0 persen	27.040.500					0 persen	27.040.500	0	21.11		126.843.600		90.76	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	139.755.000	1 dokumen	128.113.400	0 dokumen	13.109.000	0 dokumen	27.040.500					0 dokumen	27.040.500	0	21.11		126.843.600		90.76	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0	21.11			0	90.76	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam	indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Puspaga	86 persen	371.141.100	82 persen	187.074.300	0 persen	29.448.816	0 persen	66.910.116					0 persen	66.910.116	0	35.77		66.910.116		18.03	

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten/kota yang tersedia	18 layanan	371.141.100	3 layanan	187.074.300	3 layanan	29.448.816	12 layanan	66.910.116					12 layanan	66.910.116	400	35.77	12 layanan	66.910.116	66.67	18.03	1118%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																400	35.77			66.67	18.03	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	28.44			0	54.4	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	**Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan**	**100 Dokumen**	**131.991.610**	**1 Dokumen**	**89.640.150**	**0 Dokumen**	**8.600.000**	**0 Dokumen**	**29.667.000**					**0 Dokumen**	**29.667.000**	**0**	**33.1**	**100 Dokumen**	**64.586.200**	**100**	**48.93**	

GENDER DAN ANAK	**sistem data gender**																				
	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen			0				
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1 Dokumen	131.991.610	1 Dokumen	89.640.150	0 Dokumen	8.600.000	0 Dokumen	29.667.000					0 Dokumen	29.667.000	0	33.1	1 Dokumen	64.586.200	100	48.93	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	122 dokumen	87.926.858	1 dokumen	53.223.000	0 dokumen	5.600.000	0 dokumen	22.317.000					0 dokumen	22.317.000	0	41.93		57.236.200		65.1	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kekerasan perempuan dan anak yang di verifikasi, jumlah dokumen data pelaporan E-Kekerasan SIMPONI	12 Dokumen	44.064.752	12 Dokumen	36.417.150	1 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	7.350.000					4 Dokumen	7.350.000	33.33	20.18	4 Dokumen	7.350.000	33.33	16.68	165%

	PPA yang telah tersaji di website																					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																16.67	31.06			33.33	40.89	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	33.1			100	48.93	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**IPA (Indeks Perlindungan Anak)**	**64 indeks**	**281.837.461**	**62.73 indeks**	**358.175.600**	**0 indeks**	**41.443.816**	**0 indeks**	**96.547.200**					**0 indeks**	**96.547.200**	**0**	**26.96**		**252.759.400**		**89.68**	
	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	658		658		0		0						0		0	0					
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase desa layak anak	5 persen	126.591.618	4 persen	170.949.000	0 persen	31.849.816	0 persen	71.498.200					0 persen	71.498.200	0	41.82		161.029.400		127.2	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan dunia Usahayang Mendapat advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	48 organisasi	95.000.000	3 organisasi	142.249.000	3 organisasi	26.265.816	3 organisasi	55.859.200					3 organisasi	55.859.200	100	39.27	3 organisasi	145.390.400	6.25	153.04	255%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.591.618	1 Dokumen	28.700.000	0 Dokumen	5.584.000	0 Dokumen	15.639.000					0 Dokumen	15.639.000	0	54.49		15.639.000		49.5	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																50	46.88			6.25	101.27	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	100 persen	155.245.843	100 persen	187.226.600	0 persen	9.594.000	0 persen	25.049.000					0 persen	25.049.000	0	13.38		91.730.000		59.09	

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang mendapatkan penguatan																				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	314 orang	27.105.482	300 orang	41.960.400	70 orang	7.774.000	95 orang	12.181.000					95 orang	12.181.000	31.67	29.03	95 orang	12.181.000	30.25	44.94	109%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	74.461.464	3 Dokumen	45.559.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	5.214.000					0 Dokumen	5.214.000	0	11.44		55.979.000		75.18	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	34.044.318	3 Dokumen	41.959.000	0 Dokumen	1.250.000	0 Dokumen	5.784.000					0 Dokumen	5.784.000	0	13.78		5.784.000		16.99	

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	19.634.579	1 Dokumen	57.748.200	0 Dokumen	570	0 Dokumen	1.870.000					0 Dokumen	1.870.000	0	3.24	1 Dokumen	17.786.000	2.86	90.59	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																7.92	14.37			16.56	56.93	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	27.6			0	93.15	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara konprehensif**	**100 persen**	**90.999.914**	**10 persen**	**235.409.500**	**100 persen**	**10.608.737**	**100 persen**	**27.965.003**					**100 persen**	**27.965.003**	**1**	**11.88**	**100 persen**	**108.667.929**	**100**	**119.42**	**8%**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa yang bekerjasama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan	4 buah	19.276.510	1 buah	36.160.000	0 buah	0	0 buah	6.924.000					0 buah	6.924.000	0	19.15		24.270.200		125.91	

	kekwersan terhadap anak																			
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memeperoleh Advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	300 orang	19.276.510	300 orang	36.160.000	0 orang	0	100 orang	6.924.000					100 orang	6.924.000	33.33	19.15	100 orang	24.270.200	33.33	125.91	174%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																33.33	19.15			33.33	125.91	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	82 nilai	42.073.904	82 nilai	169.600.000	0 nilai	10.608.737	0 nilai	20.081.003					0 nilai	20.081.003	0	11.84		73.311.329		174.24	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase korban anak yang terlayani	100 Orang	42.073.904	10 Orang	169.600.000	0 Orang	10.608.737	0 Orang	20.081.003					0 Orang	20.081.003	0	11.84		73.311.329		174.24	

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																						
	Jumlah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan	18 Orang		10 Orang		6 Orang		12 Orang						12 Orang		120	0	20 Orang		111.11		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																60	11.84			111.11	174.24	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 lembaga	29.649.500	4 lembaga	29.649.500	0 lembaga	0	0 lembaga	960					0 lembaga	960	0	3.24		11.086.400		37.39	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100 Orang	29.649.500	100 Orang	29.649.500	0 Orang	0	0 Orang	960					0 Orang	960	0	3.24	50 Orang	11.086.400	50	37.39	

Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																0	3.24			50	37.39	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	11.41			0	112.51	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaaan**	**1 kerjasama**	**125.000.000**	**1 kerjasama**	**15.927.473.800**	**0 kerjasama**	**72.228.200**	**0 kerjasama**	**72.228.200**					**0 kerjasama**	**72.228.200**	**0**	**0.45**		**72.228.200**		**57.78**	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terfasilitasinya kerja sama antar desa	1 kerjasama	125.000.000	1 kerjasama	15.927.473.800	0 kerjasama	72.228.200	0 kerjasama	72.228.200					0 kerjasama	72.228.200	0	0.45		72.228.200		57.78	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	8 kerjasama	125.000.000	2 kerjasama	120.000.000	1 kerjasama	72.228.200	1 kerjasama	72.228.200					1 kerjasama	72.228.200	50	60.19	1 kerjasama	72.228.200	12.5	57.78	83%
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	1 kerjasama	0	1 kerjasama	15.807.473.800	0 kerjasama	0	0 kerjasama	0					0 kerjasama	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																25	30.1			12.5	57.78	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	0.45			0	57.78	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat	Sangat			Sangat	Tinggi	

																Rendah	Rendah			Rendah		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu**	**100 Persen**	**52.907.734.800**	**90 Persen**	**7.650.517.600**	**25 Persen**	**1.684.998.000**	**25 Persen**	**3.570.885.989**					**25 Persen**	**3.570.885.989**	**27.78**	**46.68**	**25 Persen**	**4.276.199.989**	**25**	**8.08**	**60%**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154 Desa	52.907.734.800	154 Desa	7.650.517.600	71 Desa	1.684.998.000	71 Desa	3.570.885.989					71 Desa	3.570.885.989	46.1	46.68	225 Desa	4.276.199.989	146.1	8.08	99%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	154 Desa		154 Desa		154 Desa		154 Desa						154 Desa		100	0	308 Desa		200		
	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	100 persen		96 persen		25 persen		25 persen						25 persen		26.04	0	25 persen		25		
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100 persen		100 persen		25 persen		25 persen						25 persen		25	0	25 persen		25		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	95 persen		90 persen		25 persen		25 persen						25 persen		27.78	0	25 persen		26.32		
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminanan kesehatannya	100 persen	8.381.989.000	100 persen	168.168.000	30 persen	168.168.000	108 persen	1.512.540.256					108 persen	1.512.540.256	108	899.42	108 persen	1.512.540.256	108	18.05	12%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	924 Desa	26.886.719.900	154 Desa	4.516.910.000	154 Desa	34.000.400	154 Desa	34.000.400					154 Desa	34.000.400	100	0.75	308 Desa	67.755.200	33.33	0.25	13333%

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154 Desa	1.087.725.000	154 Desa	200.000.000	154 Desa	43.370.000	154 Desa	43.370.000					154 Desa	43.370.000	100	21.69	308 Desa	222.954.800	200	20.5	461%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Desa yang Menetapkan Pertanggung jawaban APBDes Tepat Waktu	95 dokumen	3.457.740.000	4 dokumen	766.699.900	4 dokumen	766.699.900	4 dokumen	888.451.700					4 dokumen	888.451.700	100	115.88	8 dokumen	1.328.791.300	8.42	38.43	86%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	154 Desa	287.910.000	154 Desa	61.590.000	154 Desa	96.000.000	154 Desa	167.570.200					154 Desa	167.570.200	100	272.07	154 Desa	167.570.200	100	58.2	37%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	154	10.105.374.900	17	1.243.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0					
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terwujudnya Database Perangkat Desa Se-Kabupaten Balangan	154 Desa	320.000.000	154 Desa	102.749.700	154 Desa	102.749.700	154 Desa	150.866.900					154 Desa	150.866.900	100	146.83	154 Desa	150.866.900	100	47.15	68%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	100 dokumen	1.123.670.000	2 dokumen	71.200.000	2 dokumen	71.200.000	2 dokumen	82.358.833					2 dokumen	82.358.833	100	115.67	6 dokumen	133.993.633	6	11.92	86%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang selesai Penetapan Batas Desa	21 Desa	700.000.000	154 Desa	400.200.000	154 Desa	400.200.000	154 Desa	623.498.200					154 Desa	623.498.200	100	155.8	154 Desa	623.498.200	733.33	89.07	64%

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9 Desa	556.606.000	154 Desa	120.000.000	7 Desa	2.610.000	23 Desa	68.229.500					23 Desa	68.229.500	14.94	56.86	23 Desa	68.229.500	255.56	12.26	26%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																82.29	178.5			171.63	32.87	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																44.98	46.68			84.48	8.08	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu**	**100 persen**	**0**	**90 persen**	**0**	**0 persen**	**0**	**0 persen**	**0**					**0 persen**	**0**	**0**						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	0			0	0	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang**	**70 persen**	**5.838.905.000**	**60 persen**	**9.147.175.500**	**0 persen**	**8.901.221.500**	**60 persen**	**8.901.221.500**					**60 persen**	**8.901.221.500**	**100**	**97.31**	**60 persen**	**9.576.955.800**	**85.71**	**164.02**	**103%**

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	60 Dokumen	5.838.905.000	10 Dokumen	9.147.175.500	0 Dokumen	8.901.221.500	0 Dokumen	8.901.221.500					0 Dokumen	8.901.221.500	0	97.31		9.576.955.800		164.02	
	Jumlah Posyantek di desa	60 desa		50 desa		0 desa		0 desa						0 desa		0	0					
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	156 Orang	274.200.000	306 Orang	3.196.968.900	306 Orang	3.014.168.900	306 Orang	3.014.168.900					306 Orang	3.014.168.900	100	94.28	306 Orang	3.689.903.200	196.15	1	106%

	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	164		220		220		220						220		100	0	220		134.15		
	Jumlah LPM dibina	164 Lembaga		164 Lembaga		153 Lembaga		153 Lembaga						153 Lembaga		93.29	0	153 Lembaga		93.29		
	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	56 Desa		153 Desa		153 Desa		153 Desa						153 Desa		100	0	153 Desa		273.21		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	112 Bumdes	3.885.305.000	110 Bumdes	4.243.300.300	110 Bumdes	4.243.300.300	110 Bumdes	4.243.300.300					110 Bumdes	4.243.300.300	100	100	110 Bumdes	4.243.300.300	98.21	109.21	100%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	55	279.400.000	50	279.400.000	35	216.246.000	35	216.246.000					35	216.246.000	70	77.4	35	216.246.000	63.64	77.4	90%
	Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	3 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah						10 Buah		100	0	10 Buah		333.33		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa,Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165 TP PKK	1.400.000.000	165 TP PKK	1.427.506.300	153 TP PKK	1.427.506.300	153 TP PKK	1.427.506.300					153 TP PKK	1.427.506.300	92.73	100	153 TP PKK	1.427.506.300	92.73	101.96	93%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																94.5	92.92			160.59	72.39	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat	Sangat			Sangat	Sangat	

															Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															0	97.31			0	164.02	
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**62.44 persen**	**5.389.307.355**	**60.32 persen**	**4.075.120.800**	**11.7 persen**	**662.173.600**	**11.7 persen**	**1.616.134.485**					**11.7 persen**	**1.616.134.485**	**19.4**	**39.66**	**11.7 persen**	**17.737.844.485**	**18.74**	**329.13**	**49%**
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pembangunan Keluarga	62 Persen	1.360.893.512	60 Persen	932.175.500	0 Persen	62.032.700	0 Persen	245.211.700					0 Persen	245.211.700	0	26.31		16.366.921.700		1	
	Jumlah Regulasi Daerah / Dokumen Perencanaan Yang Memanfaatkan GDPK	6 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen		0	0					
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	1 Dokumen	348.154.092	1 Dokumen	223.175.700	1 Dokumen	38.607.700	1 Dokumen	105.215.400					1 Dokumen	105.215.400	100	47.14	5 Dokumen	16.226.925.400	500	4	212%

	Kabupaten/Kota																					
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	214.500.000	2 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	14.585.000	4 Dokumen	69.585.000					4 Dokumen	69.585.000	200	63.26	4 Dokumen	69.585.000	200	32.44	316%
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	13 satuan pendidikan	457.377.580	8 satuan pendidikan	377.999.800	2 satuan pendidikan	7.800.000	5 satuan pendidikan	69.371.300					5 satuan pendidikan	69.371.300	62.5	18.35	5 satuan pendidikan	69.371.300	38.46	15.17	341%

Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	3 organisasi	340.861.840	2 organisasi	221.000.000	1 organisasi	1.040.000	1 organisasi	1.040.000					1 organisasi	1.040.000	50	0.47	1 organisasi	1.040.000	33.33	0.31	10638%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																103.13	32.31			192.95	12.98	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100 persen	4.028.413.843	100 persen	3.142.945.300	0 persen	600.140.900	2 persen	1.370.922.785					2 persen	1.370.922.785	2	43.62	2 persen	1.370.922.785	2	34.03	5%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	36 Laporan	3.194.530.196	12 Laporan	2.719.830.700	3 Laporan	586.050.000	6 Laporan	1.262.761.700					6 Laporan	1.262.761.700	50	46.43	6 Laporan	1.262.761.700	16.67	39.53	108%

Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Yang Di Bentuk	214 Rumah Dataku	427.752.000	42 Rumah Dataku	182.800.000	42 Rumah Dataku	12.368.200	42 Rumah Dataku	36.163.700					42 Rumah Dataku	36.163.700	100	19.78	42 Rumah Dataku	36.163.700	19.63	8.45	506%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	24 Laporan	406.131.647	12 Laporan	240.314.600	3 Laporan	1.722.700	6 Laporan	71.997.385					6 Laporan	71.997.385	50	29.96	6 Laporan	71.997.385	25	17.73	167%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																66.67	32.06			20.43	21.9	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0.67	34.97			2	17.52	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)**	**77.5 persen**	**388.000.000**	**76.9 persen**	**2.752.762.000**	**50 persen**	**2.303.744.000**	**76.9 persen**	**3.070.683.070**					**76.9 persen**	**3.070.683.070**	**100**	**111.55**	**76.9 persen**	**3.796.100.599**	**99.23**	**978.38**	**90%**

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan KIE KB	8 Laporan	265.000.000	4 Laporan	255.000.000	2 Laporan	48.000.000	4 Laporan	511.208.300					4 Laporan	511.208.300	100	200.47	12 Laporan	1.048.387.824	150	395.62	50%
Pengendalian Program KKBPK	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) disetiap desa/kelurahan	1 rasio	200.000.000	1 rasio	200.000.000	1 rasio	42.000.000	1 rasio	416.444.300					1 rasio	416.444.300	100	208.22	2 rasio	879.500.624	200	439.75	48%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase kecamatan yang melaksanakan RAKORCAM /MINLOK	50 persen	65.000.000	100 persen	55.000.000	100 persen	6.000.000	100 persen	94.764.000					100 persen	94.764.000	100	172.3	100 persen	168.887.200	200	259.83	58%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																100	190.26			200	349.79	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat	100 persen	123.000.000	100 persen	2.497.762.000	25 persen	2.255.744.000	148 persen	2.559.474.770					148 persen	2.559.474.770	148	102.47	148 persen	2.747.712.775	148	2	144%

Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat																				
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	60 persen	50.000.000	100 persen	40.000.000	70 persen	2.600.000	100 persen	22.100.000					100 persen	22.100.000	100	55.25	100 persen	170.760.005	166.67	341.52	181%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	220 Orang	0	110 Orang	175.818.000	110 Orang	0	110 Orang	142.646.200					110 Orang	142.646.200	100	81.13	110 Orang	142.646.200	50		123%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pembentukaan TIM KB Keliling	60 unit	25.000.000	39 unit	2.241.944.000	39 unit	2.241.944.000	39 unit	2.241.944.000					39 unit	2.241.944.000	100	100	39 unit	2.241.944.000	65	8	100%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Persentase akseptor KB MKJP yang mendapat pembinaan pasca pelayanan	8.41 persen	48.000.000	100 persen	40.000.000	30 persen	11.200.000	60 persen	152.784.570					60 persen	152.784.570	60	381.96	60 persen	192.362.570	713.44	400.76	16%

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																90	154.59			248.78	250.09	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																124	151.47			149	198.81	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)**	**14 Orang**	**106.000.000**	**16 Orang**	**267.000.000**	**0 Orang**	**7.040.000**	**0 Orang**	**126.433.700**					**0 Orang**	**126.433.700**	**0**	**-11.18**		**126.433.700**		**116.16**	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	21.88 persen	0	30 persen	175.000.000	30 persen	4.240.000	30 persen	37.349.500					30 persen	37.349.500	100	21.34	30 persen	37.349.500	137.11		469%

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Unit	0	4 Unit	40.000.000	0 Unit	1.500.000	1 Unit	16.150.000					1 Unit	16.150.000	25	40.38	1 Unit	16.150.000			62%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kader	0	25 Kader	45.000.000	0 Kader	1.300.000	8 Kader	9.227.400					8 Kader	9.227.400	32	20.51	8 Kader	9.227.400			156%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	0 Kader	0	504 Kader	23.000.000	0 Kader	0	0 Kader	0					0 Kader	0	0	0					

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Ekonomi Keluarga/UPPKS)																				
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Kelompok	0	8 Kelompok	45.000.000	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0					0 Kelompok	0	0	0				
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	0 Kelompok	0	165 Kelompok	22.000.000	3 Kelompok	1.440.000	44 Kelompok	11.972.100					44 Kelompok	11.972.100	26.67	54.42	44 Kelompok	11.972.100		49%

Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk																					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																16.73	23.06			0	0	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	100 Persen	106.000.000	100 Persen	92.000.000	0 Persen	2.800.000	0 Persen	89.084.200					0 Persen	89.084.200	0	96.83		89.084.200		84.04	
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam	0.69 Persen		0.69 Persen		0 Persen		0 Persen						0 Persen		0	0					

	pembangunan keluarga																				
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	75 persen	38.000.000	75 persen	32.000.000	0 persen	1.500.000	75 persen	66.766.900					75 persen	66.766.900	100	208.65	75 persen	66.766.900	100	175.7	48%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/Mahasiswa	100 persen	68.000.000	80 persen	60.000.000	0 persen	1.300.000	75 persen	22.317.300					75 persen	22.317.300	93.75	37.2	75 persen	22.317.300	75	32.82	252%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																96.88	122.93			87.5	104.26	

Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	33.33	59.09			137.11	84.04	
Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)	20.2	38.22			68	161.1	
Predikat Kinerja (Seluruh Program)	Sangat Rendah	Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)	36	49.14			73.06	74.59	
Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	81.3	80.96			111.77	71.96	
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan pada perubahan mencakup 13 (Tiga Belas) Program, 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) Sub Kegiatan dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategi.

Uraian selengkapannya capaian kinerja per indikator sampai bulan Juni 2024 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Pagu anggaran Rp. 54.026.414.079,- realisasi sebesar Rp. 18.141.311.420, sisa pagu anggaran Rp. 35.885.102.659,-

   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

      Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu sebesar Rp. 114.050.000,- dan Realisasi Rp. 33.788.800,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 80.261.200,-.

      Realisasi kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 1 dokumen yaitu telah tersusunnya rancangan matrik renja tahun 2024. Dan terkait dokumen lainnya masih dalam proses penyusunan.

   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

      Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pagu sebesar Rp. 82.250.000,- dan Realisasi Rp. 29.711.300,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 52.538.700,-.

      Realisasi kinerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar sampai dengan bulan juni adalah telah tersusunnya laporan capaian kinerja triwulan sampai dengan triwulan II.

b. **Kegiatan Adminstrasi Keuangan dan Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran Rp. 8.594.603.129,- realisasi sebesar Rp. 2.997.058.061,-, sisa pagu anggaran Rp. 5.597.545.068,-. Capaian Kinerja sebesar 100 % yaitu telah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tiap bulan sebanyak 6 bulan sebnayak 43 Orang

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran Rp. 63.406.000,- realisasi sebesar Rp. 35.364.000,-,

sisa pagu anggaran Rp. 28.042.000,-.

Capaian Kinerja dapat terealisasi pada triwulan IV dengan

tersedianya laporan keuangan akhir tahun

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran Rp. 43.010.000,- realisasi sebesar Rp. 23.731.000,-, sisa pagu anggaran Rp. 19.279.000,-.

Capaian Kinerja terealisasinya 1 laporan semesteran SKPD.

1) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pagu anggaran Rp. 139.750.000,- realisasi sebesar Rp. 132.000.000,-

sisa pagu anggaran Rp. 7.750.000,-.

Capaian kinerja sebesar 260 Paket pakaian dinas beserta kelengkapannya yaitu telah tersedia pakaian dinas untuk mendukung hari jadi Kabupaten Balangan.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp.,- sisa pagu anggaran Rp.,-

Capaian kinerja sebesar yang telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dari
pegawai.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2) Pagu anggaran Rp. 234.950.000,- realisasi sebesar Rp.61.598.817- sisa pagu anggaran Rp.228.790.180,-

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tiap bulan sebanyak 6 bulan.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pagu anggaran Rp. 381.639.200,- realiasi sebesar Rp. 175.571.800,- sisa pagu anggaran Rp. 206.067.400,-

Capaian kinerja sebesar telah terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor selama 6 bulan.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu anggaran Rp. 203.780.000,- realiasi sebesar Rp. 45.925.800,- sisa pagu anggaran Rp. 157.854.200,-

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terpenuhinya pemeilihataan terhadap kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang layak fungsi selama 6 bulan.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu anggaran Rp. 201.122.200,- realiasi sebesar Rp. 26.023.443,- sisa pagu anggaran Rp. 175.098.757,-

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terpenuhinya pemeilihataan terhadap kendaraan dinas operasional yang layak fungsi selama 6 bulan.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota

Pagu anggaran Rp. 61.920.000,- realisasi anggaran Rp. 34.714.000,- sisa pagu anggaran Rp. 27.206.000,-

Tercapainya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/KotaAdvokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Pagu anggaran Rp. 119.106.000,- realisasi anggaran Rp. 82.688.716,- sisa pagu anggaran Rp. 36.417.284,-

Tercapainya Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG termasuk PPRG.

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pagu anggaran Rp. 1.049.999.800,- belum ada realisasi

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut sebanyak 1 organisasi kemasyarakat yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan

2) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pagu anggaran Rp. 97.669.300,- dengan realisasi anggaran 40.283.300,- dan sisa anggaran 57.386.000,-.

Target Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sebanyak 3 organisasi.

3. Program Perlindungan Perempuan

a. Kegiatan Penyediaaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kondisi Kewenangan

1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota

Pagu anggaran Rp. 40.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.350.000,- sampai TW II dengan sisa anggaran 21.710.000,-.

Sampai dengan Triwulan II sudah terdata 2 terdapat kasus Perempuan korban kekerasan Tingkat kabupaten/kota sehingga belum terdapat realisasi kinerja.

b. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuab Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 101.229.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.539.000,- dengan sisa anggaran 58.690.300,-.

Target capaian kinerja pada tahun ini yaitu Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota sebanyak 12 perangkat daerah.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 128.113.400,- realisasi anggaran Rp.54.100.500,- sisa pagu anggaran Rp.74.012.900,-.

Capaian kinerja dari sub kegiatan tersebut belum ada, namun direncanakan akan terealisasi pada triwulan III dengan adanya desa yang terfasilitasi pembinaan dalam pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga, dan untuk perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 187.074.300,- realisasi anggaran Rp.89.915.686,- sisa pagu anggaran Rp. 97.158.614,-.

Telah tercapainya target dari sub kegiatan tersebut dengan terdapat 1 layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia (PUSPAGA).

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 53.223.000,- realisasi anggaran Rp.24.627.000,- sisa pagu anggaran Rp. 28.596.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut telah tercapai dengan tersedianya 1 dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia.

2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 39.499.700,- realisasi anggaran Rp.15.850.000,- sisa pagu anggaran Rp.23.649.700,-

Capaian kinerja hingga triwulan II ini belum terdapat realisasi dalam mencpai target yang ditetapkan, pencapaian target tersebut direncanakan pada triwulan IV.

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp.142.249.000,- realisasi anggaran Rp.73.247.000,- sisa pagu anggaran Rp. 69.002.000,-.

Telah terpenuhinya target dari indikator sub kegiatan diatas, dengan 1 Organisasi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pmerintah, media dan dunia.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp.28.700.000,- realisasi anggaran Rp. 19.744.000,- sisa pagu anggaran Rp. 8.956.000,-.

Capaian kinerja hingga triwulan II ini belum terdapat realisasi dalam mencpai target yang ditetapkan, pencapaian target tersebut direncanakan pada triwulan III.

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten dan Kota

Pagu anggaran Rp. 41.960.400,- realisasi anggaran Rp. 20.058.000,- sisa pagu anggaran Rp.21.902.400,-

Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini telang menjangkau lebih dari 110 anak yang mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten dan Kota pada Triwulan ketiga dan akan terus berpogres.

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 45.599.000,- realisasi anggaran Rp. 4.414.000,- sisa pagu anggaran Rp.49.973.000,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut suda terealisasi 1 dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dari target 3 Dokumen) pada TW II.

3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 41.959.000,- realisasi anggaran Rp. 17.783.00,- sisa pagu anggaran Rp.24.176.000,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut suda terealisasi 1 dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (dari target 3 Dokumen) pada TW II.

4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 57.748.200,- realisasi anggaran Rp. 2.070.000,- sisa anggaran Rp. 55.678.200,-.

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, karena ditargetkan akan terlaksana pada TW IV.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 36.160.000,- realisasi anggaran Rp.13.624.000,- sisa pagu anggaran Rp. 17.536.000,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 84.800.000,- realisasi anggaran Rp.35.449.740,- sisa pagu anggaran Rp. 49.350.260,-

Capaian kinerja Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan sudah memenuhi target 2024 yaitu 10 Anak, namun tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah karena indikator ini bersifat insidental.

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 29.649.000,- realisasi anggaran Rp. -,- sisa pagu anggaran Rp. ,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

8. Program Kerja Sama Antar Desa

a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pagu anggaran Rp. 15.807.473.800,- realisasi anggaran Rp. 6.245.680.160,- sisa pagu anggaran Rp. 9.561.793.640,-

Capaian kinerja dari kegiatan tersebut belum ada realisasi dalam menjawab indikator dan target yang ditetapkan.

9. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pagu anggaran Rp. 1.681.680.000,- realisasi anggaran Rp. 672.186.128 ,- sisa pagu anggaran Rp. 1.009.493.872,-

Telah tercapainya target yang ditetapkan dari sub kegiatan diatas dengan tersedianya 1 dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Pagu anggaran Rp. 34.400.000,- realisasi anggaran Rp. 0,- sisa pagu anggaranRp. 34.400.000,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu anggaran Rp. 766.699.900,- realisasi anggaran Rp. 233.658.700 sisa pagu anggaran Rp. 473.036.700,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pagu anggaran Rp. 71.200.000,- realisasi anggaran Rp. 30.845.733,- sisa pagu anggaran Rp. 40.354.267,-

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dipotimalkan pada pelaksanaan triwulan yang akan datang.

5) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Pagu anggaaran Rp. 87.600.000,- realisasi anggaran Rp.62.849.500,- sisa pagu anggaran Rp. 24.750.500,-.

Capaian kinerja untuk menjawab indikator dari kegiatan tersebut sudah mencapai 9 dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu anggaran Rp. 255.500.000,- realisasi anggaran Rp. - sisa pagu anggaran Rp. 255.500.000,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III.

7) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pagu anggaran Rp. 400.200.000,- realisasi anggaran Rp. 118.681.600- sisa pagu anggaran Rp. 281.518.400,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut sudah terealisasi sebanyak 34 desa pada TW II.

8) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pagu anggaran Rp. 96.000.000,- realisasi anggaran Rp. 27.530.100 sisa pagu anggaran Rp. 68.469.900,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III.

9) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pagu anggaran Rp. 102.749.700,- realisasi anggaran Rp. 24.058.600 - sisa pagu anggaran Rp. 78.691.100,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut sudah terealisasi pada TW 1 dengan keluaran 1 Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pagu anggaran Rp. 2.977.101.600,- realisasi anggaran Rp.2.070.586.266,- sisa pagu anggaran Rp. 906.515.334,-.

Telah tercapai target dari indikator sub kegiatan diatas dengan adanya 1 lembaga kemasyarakatan desa yang di tingkatkan yaitu Posyandu melalui pembinaan terhadap kader-kader.

2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pagu anggaran Rp. 4.243.300.300,- realisasi anggaran Rp. 1.374.979.500,- sisa pagu anggaran Rp. 2.868.320.800,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi

kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III

3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pagu anggaran Rp. 181.500.300,- realisasi anggaran Rp.100.393.028,- sisa pagu anggaran Rp. 81.107.272,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III .

4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pagu anggaran Rp. 1.427.506.300,- realisasi anggaran Rp. 509.583.807,- sisa pagu anggaran Rp. 917.922.493,-

Capaian kinerja untuk kegiatan tersebut belum ada realisasi kinerja, realisasi dari target yang telah ditetapkan untuk dapat menjawab indikator dapat dilihat pada triwulan III.

11. Program Pengendalian Penduduk

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 223.175.700,- realisasi anggaran Rp. 111.935.700,- sisa pagu anggaran Rp. 111.240.000,-

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai

2) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

Pagu anggaran Rp. 110.000.000,- realisasi anggaran Rp. 39.370.000,- sisa pagu anggaran Rp. 70.630.000,-

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai

3) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Pagu anggaran Rp. 377.999.800,- realisasi anggaran Rp.

110.199.800,- sisa pagu anggaran Rp. 267.800.000,-

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai

4) Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan

Pagu anggaran Rp. 221.000.000 ,- realisasi anggaran Rp. 15.531.500,- sisa pagu anggaran Rp. 205.468.500,-

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pagu anggaran Rp. 182.800.000,- realisasi anggaran Rp. 74.883.700,- sisa pagu anggaran Rp. 107.916.300,-

2) Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

Pagu anggaran Rp. 3.417.838.700,- realisasi anggaran Rp. 1.269.761.700,- sisa pagu anggaran Rp. 2.148.077.000,-

3) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

Pagu anggaran Rp. 1.176.088.600,- realisasi anggaran Rp. 107.200.624,- sisa pagu anggaran Rp. 1.068.887.976,-

12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1) Pengendalian Program KKBPK

Pagu anggaran Rp. 354.150.000,- realisasi anggaran Rp. 126.000.000,- sisa pagu anggaran Rp. 228.150.000,- .Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 4 Laporan Pengendalian Program KKBPK pada TW II.

2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)

Pagu anggaran Rp. 161.670.000,- realisasi anggaran Rp. 32.480.000,- sisa pagu anggaran Rp. 129.190.000,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 2 Laporan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok) selama TW II.

b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

   Pagu anggaran Rp. 49.241.750,- realisasi anggaran Rp.7.800.000,- sisa pagu anggaran Rp. 41.441.750,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 6 Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya selama TW II.

2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

   Pagu anggaran Rp. 249.508.000,- realisasi anggaran Rp. 117.511.200,- sisa pagu anggaran Rp. 131.996.800,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 518 orang yang mengikuti MKJP selama TW II.

3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

   Pagu anggaran Rp. 345.639.000,- realisasi anggaran Rp. 86.871.785,- sisa pagu anggaran Rp. 258.767.215,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 3 Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Pagu anggaran Rp. 2.241.944.000,- realisasi anggaran Rp. ,- sisa pagu anggaran Rp.,- .

13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

   Pagu anggaran Rp. 52.000.000,- realisasi anggaran Rp. 14.650.000,- sisa pagu anggaran Rp. 37.350.000,- . Belum ada capaian kinerja sampai dengan TW II dikarenakan angkan baru akan tersedia pada TW IV.

2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

   Pagu anggaran Rp. 97.957.900,- realisasi anggaran Rp. 10.527.900,- sisa pagu anggaran Rp. 87.430.000,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 10 orang yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
   pada awal TW II dan sisanya akan dilaksanakan pada TW III.

3) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita BKB , Bina Keluarga Remaja BKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK-R Bina Keluarga Lansia BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

4) Pagu anggaran Rp. 223.585.800,- realisasi anggaran Rp. 10.532.100,- sisa pagu anggaran Rp. 213.053.700,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 41 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita BKB , Bina Keluarga Remaja BKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK-R Bina Keluarga Lansia BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga) yang dibentuk selama TW II.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

   Pagu anggaran Rp. 2.654.444.000,- realisasi anggaran Rp. 53.326.900,- sisa pagu anggaran Rp. 2.601.117.100,- . Capaian kinerja pada sub kegiatan ini sudah mencapai 1 Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS selama TW II.

2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

   Pagu anggaran Rp. 116.009.400,- realisasi anggaran Rp. 26.277.300,- sisa pagu anggaran Rp. 89.732.100,- . Masih belum ada Capaian kinerja selama TW II karena akan dilaksanakan pada TW berikutnya.

2.3 Analisis Pelayanan Kinerja

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pelayananan pemerintahan yang baik serta mampu bersaing dalam bidang pelayanan publik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pemberian pelayanan baik dalam urusan perlindungan terhadap perempuan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik adalah efektifitas pelaksana penyelenggaraan publik dalam

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

IPG (Indeks Pembangunan Gender) adalah indeks perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM Perempuan yang dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. Sedangkan IDG adalah indeks pemberdayaan gender yang mengukur partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Kedua indeks tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender dan pemberdayaan gender sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan gender.

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merpakan nilai rasio paling sempurna.

Selanjutnya Indikator yang kedua “Indeks Pemberdayaan Gender”. IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persaaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapka mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

1) Masih adanya budaya patriaki yang dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga menghambat/menciptakan kesenjangan gender di tengah masyarakat.
2) Belum optimalnya kerjasama yang dibangun oleh beberapa organisasi secara sektoral dalam lingkup pemerintah daerah serta organisasi dari lintas sektor lain.

Kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 adalah setia perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hampir semua insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak, bukan hanya insiden yang hanya berhenti disitu, melainkan juga menjadi faktor yang memicu terjadinya berbagai jenis kekerasa lainnya seperti perdagangan manusia (human trafficking) dan pemiskinan kaum perempuan. Berdasarkan penelitian, sebagian besar perempuan dan anak- anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada akhirnya terperangkap dalam berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti dipaksa menjadi pelacur, babu, buruh kasar dan lain sebagainya

Faktor utama penyebab merebaknya serta tak terkendalinya kekerasan yang dialami perempuan dan anak, dikarenakan selama ini terkesan pemerintah maupun masyarakat sipil melihat dan menangani ini, sebagai dua masalah yang terpisah, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, padahal ini merupakan permasalahan yang integral dan saling mempengaruhi. Dimana dapat dipastikan, jika terjadi kekerasan menimpa perempuan, kemungkinan besar di dalamnya juga terjadi kekerasan terhadap anak.

Permasalahan/hambatan

1. Adanya rasa enggan/malu melaporkan atas kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwenang, karena beranggapan itu adalah aib.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. ASFR digunakan untuk dasar untuk proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak adalah status umur saat hamil dan bersalin pada seorang ibu. Kehamilan dan persalinan pada usia muda merupakan kehamilan yang berisiko, diantaranya dapat mengakibatkan kematian ibu, kematian bayi/anak, dan kekurangan gizi pada bayi/anak. Apabila kekurangan gizi berlangsung lama pada janin dan bayi sampai dengan usia anak dua tahun, maka akan terjadi stunting. Indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur muda ini dapat dilihat melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun. Pada tahun 2022, ASFR 15-19 tahun di kabupaten Balangan 18 per 1000 penduduk perempuan. Jumlah pernikahan usia muda sedikit tapi yang hamil usia muda banyak seperti di kecamatan Halong yang tercatat di elsimil untuk catin usia 15-19th 0 tetapi jumlah ibu hamil yang

didampingi sejumlah 61 orang. Beberapa hasil audit stunting yang memang sasarannya usia 15-19th itu sudah hamil pertama bahkan kedua. Disini lebih banyak faktor ekonomi dan putus sekolah. Terdapat hubungan positif (hubungan langsung) antara ASFR 15-19 tahun dengan prevalensi stunting. Artinya apabila di suatu daerah memiliki ASFR 15-19 tahun yang tinggi maka daerah tersebut cenderung memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya, maka upaya penurunan stunting di daerah haruslah dibarengi dengan upaya penurunan ASFR 15-19 tahun, diantaranya melalui program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) atau lebih dikenal Generasi Berencana

ASFR tahun 2021 di Kabupaten Balangan sebesar 23,90% dari target 23% atau dengan capaian kinerja 96,8%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menurunkan ASFR di Kabupaten Balangan

antara lain promosi dan KIE dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui berbagai saluran media terutama untuk usia 15-19 tahun, meningkatkan cakupan promosi dan konseling kesehatan reproduksi terhadap remaja, promosi pencegahan kehamilan risiko tinggi untuk empat terlalu khususnya terlalu muda dan untuk mencegah Kehamilan Tidak Diingankan (KTD) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi kader kelompok kegiatan remaja.

Angka Prevalence Kontrasepsi Modern (MCPR) adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Perhitungan MCPR pada tahun 2023 menggunakan aplikasi New SIGA

Realisasi pemakaian kontrasepsi modern Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 83,20 persen, sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 76,50 persen, angka ini berasal dari perhitungan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang meggunakan alat/ obat kontrasepsi sebanyak 21.864 PUS, di bagi dengan jumlah PUS sebanyak 26.269 di Kabupaten Balangan dikalikan 100 %. Data akseptor KB aktif dan pasangan usia subur di dapatkan pada aplikasi

New Siga BKKBN. Realisasi pesserta KB aktif Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 83,47 persen sementara target pada tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah sebesar 72 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan MCPR pada tahun 2023 adalah sebagai berikut

a. Penguatan kerjasama lintas sektor terutama dengan organisasi IBI dimana Bidan Pengelola Klinik KB merupakan bagian dari anggota nya. Penyuluh KB di lapangan sangat terkait erat dalam pemenuhan alat/obat konttrasepsi untuk masyarakat.
b. Penguatan kerjasama dengan RSUD Kabupaten Balangan sebagai penyedia pelayanan KB kepada PUS yang membutuhkan Medis Operasi Wanita dan Medis Operasi Pria.
c. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi Pasangan Usia Subur di 13 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Balangan.
d. Penyediaan dukungan biaya distribusi alokon dari gudang kabupaten ke 13 faskes melalui dana BOKB.
e. Penguatan penggerakan pelayanan KB MKJP melalui penyediaan dukungan

dana penggerakan yang di dalamnya sudah termasuk komponen jasa medis pelayanan KB.

f. Pembinaan peserta KB untuk menurunkan putus pakai penggunaan kontrasepsi (Drop Out/DO)
g. Memantau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan mencegah terjadinya stock out di fasilitas kesehatan melalui aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA)
h. Berkoordinasi dengan Organisasi POGI, IBI, dan IDI dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat termasuk KB pascapersalinan
i. Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum di kabupaten dan kecamatan bekerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja terkait.

Walaupun berdasarkan hasil capaian mCPR sudah memenuhi target, namun masih terdapat faktor hambatan dalam pencapaian mCPR sebagai berikut:

a. Pembatasan jumlah dan jam pelayanan di klinik KB dan pada beberapa wilayah kecamatan mengharuskan pelayanan KB MKJP dengan
b. jemput bola ke desa-desa.
c. Semua kecamatan sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan dana penggerakan KB MKJP, namun tidak semua kecamatan memiliki upaya yang sama dalam meningkatkan jumlah akseptor KB MKJP di wilayahnya.
d. Keterbatasan dalam penggunaan IT untuk system pelaporan online pada aplikasi New Siga yang seharusnya selalu update setiap saat. Khususnya untuk pelaporan pelayanan KB oleh pemberi layanan (Faskes, jaringan dan jejaringnya)
e. Belum terjalinnya kerjasama dengan pelayanan kesehatan khususnya KB di perusahan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Balangan.

Upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah dengan:

a. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB
b. Berkoordinasi dengan Organisasi POGI, IBI dan IDI dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat termasuk KB pascapersalinan
c. Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan momentum di kabupaten dan kecamatan bekerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja terkait.
d. Melakukan penggerakan pelayanan KB MKJP dengan menggunakan dana

BOKB untuk semua kecamatan di Kabupaten Balangan.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks KetahananSosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

1. Indeks ketahanan sosial terdiri dari: Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan Kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan Kesehatan)
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke Pendidikan dasar dan menengah, akses Pendidikan non formal dan ke pengetahuan);
4. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi akses ke listrik dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks ketahanan ekonomi terdiri dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdaganga, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

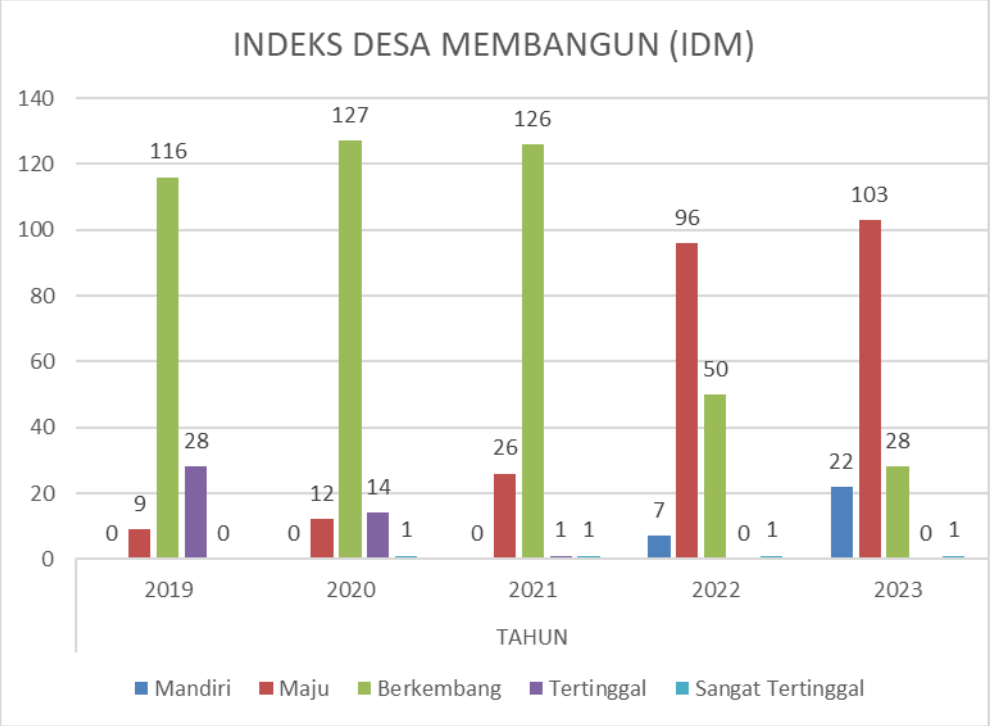

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

a. Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan pada tahun 2024 mendukung capaian tersebut yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program

Peningkatan Kerja Sama Desa.

b. Adanya dukungan pemerintah pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan penguncuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa.
c. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
d. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan tersebut diatas Kabupaten Balangan pada tahun 2024 memiliki kenaikan di beberapa status desa serta akan berdampak baik untuk desa tersebut. Secara khusus dan baik bagi Kabupaten Balangan secara umum.

Berikut sampel dari ketahanan sosial yang mengalami kenaikan status desa nya:

1. Kecamatan Awayan Desa Tangalin
   a. Peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat;
   b. Kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi;
   c. Layanan air bersih membaik dan murah
   d. Jaringan komunikasi lancar dikarenakan pemdes memfasilitasi penyediaan wifi
2. Kecamatan Awayan Desa Pulantan
   a. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat nilai kesejahteraan meningkat
   b. Adanya peningkatan Akses pada aspek-aspek ekonomi
   c. Akses informasi dan komunikasi lancer
   d. Peningkatan tahap kesehatan masyarakat
   e. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih makin membaik
   f. Ketertiban lingkungan membaik karena aktifnya kegiatan linmas
3. Kecamatan Awayan Desa Muara Jaya
   a. Dengan adanya perbaikan akses pendidikan maka hampir semua anak2 wajib sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang putus sekolah melanjutkan pada tahap kelas paket sesuai jenjang.
   b. Keberdayaan perempuan meningkat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga.
   c. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dikarenakan tersedianya jaringan air bersih dan sadarnya masyarakat terhadap perilaku hidup bersih

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah dit

1. Tantangan Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;

3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejala dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program kegiatan yang responsif gender;
6. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas disemua tingkatan;
7. Belum optimalnya bentuk fasilitasi dalam rangkakoordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berprespektif gender;
8. Masih adanya perkawinan anak di bawah umur 18 tahun;
9. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa;
11. Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan;
12. Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE.

Peluang

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;
3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Adanya komitmen kepala daerah/Bupati kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender;

5. Telah terbentuknya PUSPAGA yang merupakan wadah bagi calon Pengantin untuk mendapatkan konseling Pra nikah;
6. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu;
7. Koordinasi dengan pihak–pihak terkait berjalan dengan baik;
8. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa;
9. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa.

BAB III

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Startegis serta Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan startegis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021- 2026 diarahkan untuk turut berkontribusi mencapai Visi Bupati Balangan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berikut:

“ Membangun Desa, Menata Kota
Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera”

Misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
    1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
    2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan;
    3. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara; dan
    4. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-5 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, yakni Mewujudkan kehidupan sosial, budayam dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya local, meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga, menurunnya masalah-masalah sosial

dan kemiskinan dan meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana.

Beranjak dari Misi Kelima Bupati Balangan tersebut, maka tujuan startegis tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, yaitu:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

   Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

   a. Meningkatnya kesetaraan gender

   b. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

   Menurunya Angka Kelahiran Total

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Meningkatnya Status Pembangaunan Desa

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikaor Tujuan / Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kesetaraan gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	70.77	72	73.02	74.04	75	76
		Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Meingkatnya upaya perlindungan pada perempuan dan anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	-	-	5.2	5.5	5.5	5.5
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Dukungan Pemerintah Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status pembangunan desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	16,88 (0,6674)	23,38 (0,7293)	28,57 (0,7527)	33,77 (0,7997)	38,96 (0,80)	44,16 (0,81)
3	Meningkatnya Upaya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju Pertmbuhan Penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.34	2.34	2.33	2.33	2.32	2.32

3.2 Rencana Perubahan Renja

Tabel 3.2

Sasaran Startegis, Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah Penyesuaian

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesetaraan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,04 %
2.	Meningkatnya Upaya perlindungan pada Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	5,5 %
3.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total	2,33
4.	Meningkatnya status Pembangunan Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Desa Maju	33,77 %

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur. Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan. Anggaran sebelum perubahan berjumlah Rp. 54.026.414.079 dan setelah perubahan berjumlah Rp. 99. 084834.579. Adapun rincian perubahan program berjulah 16 (Enam belas) program, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.114.050.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 156.590.000,- bertambah sebesar Rp. 42.540.000,-

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 85.250.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 149.050.000, bertambah sebesar Rp. 63.800.000,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 8.318.707.847,- sesudah perubahan sebesar Rp. 8.294.603.129,- berkurang sebesar Rp. 24.104.718,-

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 63.406.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 166.971.000,- bertambah sebesar Rp. 103.565.000,-

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 43.010.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 172.512.000,- bertambah sebesar Rp. 129.502.000,-.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 139.750.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 205.750.000,- bertambah sebesar Rp. 66.000.000,-.

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 200.000.000,- dan sesudah perubahan Rp. 400.000.000,- bertambah sebesar Rp. 200.000.000,-.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 13.652.000,- sesudah perubahan Rp. 16.454.800,- bertambah sebesar Rp 2.802.800,-.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 44.657.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 771.470.100, bertambah sebesar Rp. 726.812.400,-.

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 63.989.900,- sesudah perubahan sebesar Rp. 70.739.900 bertambah sebesar Rp. 6.750.000,-.

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.098.800,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 862.270.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.351.416.700,- bertambah sebesar Rp. 489.146.000,-

6) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. - , dan sesudah perubahan sebesar Rp. 680.400.000,-

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 234.950.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 139.683.500 berkurang sebesar Rp.95.266.500,-

2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 381.639.200,- dan sesudah perubahan Rp. 395.072.700,- bertambah anggaran sebesar Rp.13.433.500,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 203.780.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 201.122.200,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp 126.792.200,- berkurang anggaran sebesar Rp.74.330.000,-.

2. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota

1) Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 119.106.000,- dan sesudah perubahan anggaran sebesar Rp.143.736.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 24.630.000 ,-

2) Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 61.920.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 77.630.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 15.710.000,-.

b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota

1) Sosialisasi peningkatan partisispasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 97.669.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 150.871.100,- bertambah anggaran sebesar Rp. 53.201.800,-.

2) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.049.999.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.050.749.400,- bertambah angaran sebesar Rp. 749.600,-.

3. Program Perlindungan Perempuan

a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 101.229.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 128.373.200,- bertambah anggaran Rp. 27.143.900,-

b. Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota

1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban KekerasanKewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 40.600.000,- dan tidak ada pergeseran dan perubahan.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 128.113.400,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 830.700.900,- bertambah anggaran sebesar Rp. 702.587.500,-.

b. Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 187.074.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 242.304.300,- bertambah anggaran sebesar Rp. 55.230.000,-.

5. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

a. Pengumpulan,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 53.223.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 50.223.000,- berkurang anggaran sebesar Rp. 3.000.000.,-.

2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 39.499.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 39.499.500,- berkurang anggaran sebesar Rp. 200,-

6. Pemenuhan Hak Anak

a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 142.249.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.222.509.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 80.260.000,-

2) Koordinasi dan sikronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak Kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 28.700.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 38.260.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 9.560.000,-

b. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

1) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.41.960.400,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 58.938.800,- bertambah anggaran sebesar Rp.16.978.400,-.

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten /kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 45.559.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 62.898.400,- bertambah anggaran sebesar Rp. 17.339.400,-.

3) Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 41.959.000,- dan tidak ada pergeseran dan perubahan.

4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 57.748.200,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 56.598.200,- berkurang anggaran sebesar Rp. 1.150.000,-.

7. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota

1) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 36.160.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 43.530.000,- bertambah anggaran Rp. 7.370.000,-.

b. Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota

1) Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perub ahan sebesar Rp. 84.800.000,- dan tidak ada pergeseran dan perubahan.

c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlingungan dan penanganan bagi AMPK tingktat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 29.649.500,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 40.147.000,- bertambah anggaran Rp. 10.497.500,-.

8. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebelum perubahan sebesar Rp. 15.807.473.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 36.313.953.300,- bertambah Rp. 20.506.479.500,-.

9. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.681.680.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 1.678.000.000 ,- berkurang anggaran Rp. 3.680.000,-
2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 34.400.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.
3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 255.500.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 3.416.820.000,- bertambah anggaran Rp. 3.161.320.000,-
4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 766.699.900,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 9.603.187.500,- bertambah anggaran sebesar Rp. 8.836.487.600,-.
5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 96.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 781.296.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 685.296.000,-.
6) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhantian Perangkat Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 102.749.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 102.199.700,- berkurang anggaran sebesar Rp. 550.000,-.

7) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 71.200.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 135.600.000,- bertambah anggaran sebesar Rp. 64.400.000,-.
8) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 400.200.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 678.603.500,- bertambah anggaran sebesar Rp. 278.403.500,-
9) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan sebelum perubahan sebesar Rp. 87.600.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 291.486.300,- bertambah anggaran sebesar Rp. 203.886.300,-

10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lemabaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masayarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW. PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebelum perubahan sebesar Rp. 2.977.101.600,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 5.237.901.600,- bertambah anggaran sebesar Rp. 2.260.800.000
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebelum perubahan sebesar Rp. 4.243.300.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 6.669.820.300,- bertambah anggaran sebesar Rp. 2.426.520.000,-.
3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebelum perubahan sebesar Rp. 181.500.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 184..500.300,- bertambah anggaran sebesar Rp 3.000.000,-.
4) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakatdan Kesejahteraan Keluarga sebelum perubahan sebesar Rp. 1.427.506.300,- dan sesudah perubahan sebesar Rp.

1.427.506.000,- berkurang anggaran Rp. 300,-.

11. Program Pengendalian Penduduk

a. Penganduan dan Sikronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota sebelum perubahan sebesar Rp. 223.175.700,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 223.415.200,- bertambah anggaran Rp. 239.500,-
2) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota sebelum perubahan sebesar Rp. 110.000.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.
3) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal sebelum perubahan sebesar Rp. 377.999.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 392.221.300,- bertambah anggaran Rp. 14.221.500,-
4) Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peeringatan Dini Dampak Kependudukan kepda Pemangku Kepentingan sebelum perubahan sebesar Rp. 221.000.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.

b. Pendataan Perkiraan Pengendlian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Pencatatan dan Pengumpulan Data sebelum perubahan sebesar Rp. 2.719.830.700 ,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 4.720.818.300,- bertambah anggaran Rp. 2.000.987.600,-
2) Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain sebelum perubahan sebesar Rp. 182.800.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.
3) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana sebelum perubahan sebesar Rp. 240.314.600 ,- dan sesudah

perubahan sebesar Rp. 1.176.031.000,- bertambah anggaran Rp. 935.716.400,-

12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1) Pengendalian Program KKBPK sebelum perubahan sebesar Rp. 252.000.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 354.150.000,- bertambah anggaran Rp. 102.150.000,-
2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rekorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rekordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebelum perubahan sebesar Rp. 70.795.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 176.669.100,- bertambah anggaran Rp. 105.874.100,-

b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitasi Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebelum perubahan sebesar Rp. 37.250.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 56.700.950,- bertambah anggaran Rp. 19.450.950,-
2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebelum perubahan sebesar Rp. 175.818.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 276.489.000,- bertambah anggaran Rp. 100.671.000,-
3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB sebelum perubahan sebesar Rp. 0,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 2.241.944.000 ,- bertambah anggaran Rp. 2.241.944.000,-.
4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya sebelum perubahan sebesar Rp. 334.389.000,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 345.638.900,- bertambah anggaran Rp. 11.249.900,-.

13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan

Pendapat Keluarga Akseplor (UPPKA) sebelum perubahan sebesar Rp. 52.000.000,- dan sesudah perubahan tidak ada pergeseran dan perubahan anggaran.

2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapat Keluarga Akseplor (UPPKA) sebelum perubahan sebesar Rp. 21.157.900,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 97.957.900,- bertambah anggaran Rp. 76.800.000,-.

3) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaraga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga REmaja (BKR), Pusat Infirmasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) sebelum perubahan sebesar Rp. 36.085.800,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 223.585.800,- bertambah anggaran Rp. 187.500.000,-.

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunana Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebelum perubahan sebesar Rp. 1.276.044.200,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 2.676.444.000,- bertambah anggaran Rp. 1.400.399.800,-.

2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan da Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebelum perubahan sebesar Rp. 116.009.400,- dan sesudah perubahan sebesar Rp. 189.389.700,- bertambah anggaran Rp. 73.380.300,-.

3.3 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dalam pelaksanaannya memiliki tiga urusan yang mencakup urusan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga tujuan yang dinas miliki yaitu ", Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, Menurunnya angka kelahiran total dan meningkatnya status pembangunan desa".

Mengacu pada penjelasan diatas, dimana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat program- program yang dapat mendongkrak pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk tujuan meningkatnya untuk kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak maka program tersebut meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Untuk tujuan menurunya angka kelahiran total program nya meliputi program pengendalian penduduk. Dan untuk tujuan status pembangunan desa yang baik melalui program administrasi pemerintahan desa. Berikut ini penjelasan terkait program yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas sesuai dengan analisis sosial ekonomi:

1. Tujuan dan sasaran dinas "Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak" Program program yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, dan Program Perlindungan Khusus Anak. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan sebuah program yang hadir dalam mendukung kehadiran perempuan untuk dapat memiliki keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dengan hadirnya program tersebut akan membantu dalam Menyusun sebuah kebijakan atau aturan yang memiliki sifat kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan. Secara aspek sosial dan ekonomi tentu memiliki dampak. Berkaitan dengan aspek sosial tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan yang lebih terarah dalam kesetaraan gender tentu akan menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif baik bagi

perempuan dan laki-laki, sebab setiap orang memiliki kesempatan atau peluang untuk dapat berkembang, berkarya, dan sama-sama memiliki kemampuan dalam ikut serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Secara aspek ekonomi dengan terlaksananya kesetaraan gender tentu memberi warna bagi prekonomian bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama. Dengan keterlibatan perempuan dalam aspek ekonomi serta didukung dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan hal tersebut tentu membantu menghasilkan perempuan yang memiliki nilai tambah berupa keahlian yang tentunya dengan keahlian yang dimiliki jika dipergunakan dengan baik serta dikembangkan dalam dalam bentuk usaha maka akan membantu pertumbuhan perekonomian bagi suatu wilayah.

Lebih lanjut penjelasan tersebut juga sejalan dengan program perlindungan perempuan bahwa dengan adanya kesetaraan gender maka memiliki hubungan dengan adanya perlindungan bagi perempuan. Hal tersebut menggambarkan bahwa perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan pria sehingga pemenuhan akan hak-haknya dapat terpenuhi. Dengan begitu aspek sosial yang dirasakan bahwa melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat menjadi bukti dukungan bagi pemberian perlindungan sosial, sehingga persoalan-persoalan yang sering terjadi pada perempuan terutama dalam hal kekerasan, perdangan orang hal tersebut pelan-pelan akan segera dapat teratasi.

2. Tujuan dan Sasaran Menurunnya angka kelahiran Total terdapat tiga program yang mendukung tujuan, yaitu program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana dan program pemberdayaaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik. ASFR digunakan untuk dasar untuk proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak adalah status umur saat

hamil dan bersalin pada seorang ibu. Kehamilan dan persalinan pada usia muda merupakan kehamilan yang berisiko, diantaranya dapat mengakibatkan kematian ibu, kematian bayi/anak, dan kekurangan gizi pada bayi/anak. Apabila kekurangan gizi berlangsung lama pada janin dan bayi sampai dengan usia anak dua tahun, maka akan terjadi stunting. Indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur muda ini dapat dilihat melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun. Pada tahun 2022, ASFR 15-19 tahun di kabupaten Balangan 18 per 1000 penduduk perempuan. Jumlah pernikahan usia muda sedikit tapi yang hamil usia muda banyak seperti di kecamatan Halong yang tercatat di elsimil untuk catin usia 15-19th 0 tetapi jumlah ibu hamil yang didampingi sejumlah 61 orang. Beberapa hasil audit stunting yang memang sasarannya usia 15-19th itu sudah hamil pertama bahkan kedua. Disini lebih banyak faktor ekonomi dan putus sekolah. Terdapat hubungan positif (hubungan langsung) antara ASFR 15-19 tahun dengan prevalensi stunting. Artinya apabila di suatu daerah memiliki ASFR 15-19 tahun yang tinggi maka daerah tersebut cenderung memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya, maka upaya penurunan stunting di daerah haruslah dibarengi dengan upaya penurunan ASFR 15-19 tahun, diantaranya melalui program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) atau lebih dikenal Generasi Berencana. ASFR tahun 2021 di Kabupaten Balangan sebesar 23,90% dari target 23% atau dengan capaian kinerja 96,8%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menurunkan ASFR di Kabupaten Balangan antara lain promosi dan KIE dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui berbagai saluran media terutama untuk usia 15-19 tahun, meningkatkan cakupan promosi dan konseling kesehatan reproduksi terhadap remaja, promosi pencegahan kehamilan risiko tinggi untuk empat terlalu khususnya terlalu muda dan untuk mencegah Kehamilan Tidak Diingankan (KTD) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja melalui berbagai kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi kader kelompok kegiatan remaja. Angka Prevalence Kontrasepsi Modern (MCPR) adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW,

MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Perhitungan MCPR pada tahun 2023 menggunakan aplikasi New SIGA

3. Tujuan dan sasaran "Meningkatnya status pembangunan desa".

   Program yang mendukung dalam tercapainya tujuan tersebut adalah program administrasi pemerintahan desa. Dengan adanya program tersebut tentu akan membantu dalam memberikan pelayanan dalam peningkatan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik. Oleh sebab itu tentu program tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi. Dengan pemberian peningkatan administrasi yang baik akan membantu bagi pemerintah desa terutama dalam menyiapkan atau menyusun baik kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan dan masyarakat desa.

   Dengan demikian administrasi pemerintahan desa dalam hal ini mempunyai peran dalam menunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa seperti halnya pelayanan publik yang pemerintah desa berikan jika dilaksanakan dengan cepat dan akurat. Sebuah sistem yang baik dapat terlaksana jika didukung dengan administrasi yang ada dapat berjalan dengan baik pula. Dengan begitu siklus kehidupan masyarakat yang ada di desa dapat berjalan dengan baik karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa terutama dalam proses pemenuhan kebutuhan adminitrasi dapat dilakukan dengan cepat.

IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Dinas pada tahun 2024, sehingga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan Visi organisasi.

Akhir kata semoga penyusunan renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan sesuai denga tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggran 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan.

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat Desa

H. Akhmad Nasa'i. S.Kep. MM Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650328 198603 1 008

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BALANGAN

Nama SKPD	**: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
Jumlah Program	**: 13**
Jumlah Kegiatan	**: 27**
Jumlah Sub Kegiatan	**: 68**
Pagu Total Sebelum Perubahan	**: Rp. 54.026.414.079**
Pagu Total Setelah Perubahan	**: Rp. 99.084.834.579**

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BALANGAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**0,00**	**47.942.136.247,00**	**99.545.826.179,00**	**99.545.826.179,00**							**54.007.754.542,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**47.942.136.247,00**	**99.545.826.179,00**	**99.545.826.179,00**							**54.007.754.542,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**13.362.554.247,00**	**17.161.912.629,00**	**17.161.912.629,00**							**15.530.409.672,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**				-	**76,50 Nilai**	**0,00**	**10.975.334.347,00**	**13.757.584.829,00**	**12.904.467.782,00**							**12.904.467.782,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik*				-	100 %	0,00	199.300.000,00	305.640.000,00	305.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		219.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	0,00	114.050.000,00	156.590.000,00	156.590.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			125.455.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	4 Laporan	0,00	85.250.000,00	149.050.000,00	149.050.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			93.775.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku*				-	100 %	0,00	8.425.123.847,00	8.934.086.129,00	8.934.086.129,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		9.267.636.232,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	60 Orang/bulan	0,00	8.318.707.847,00	8.594.603.129,00	8.594.603.129,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.150.578.632,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	4 Laporan	0,00	63.406.000,00	166.971.000,00	166.971.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			69.746.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				-	4 Laporan	0,00	43.010.000,00	172.512.000,00	172.512.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			47.311.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	0,00	339.750.000,00	605.750.000,00	605.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		373.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	230 Paket	0,00	139.750.000,00	205.750.000,00	205.750.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			153.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	40 Orang	0,00	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	0,00	989.669.100,00	2.215.180.300,00	2.215.180.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		1.088.636.010,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	13.652.000,00	16.454.800,00	16.454.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.017.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	44.657.700,00	771.470.100,00	771.470.100,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			49.123.470,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	63.989.900,00	70.739.900,00	70.739.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			70.388.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	4 Dokumen	0,00	5.098.800,00	5.098.800,00	5.098.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.608.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	4 Laporan	0,00	862.270.700,00	1.351.416.700,00	1.351.416.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			948.497.770,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	831.600.000,00	831.600.000,00			-	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	-		831.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	33 Unit	0,00	0,00	831.600.000,00	831.600.000,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			831.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Bulan	0,00	616.589.200,00	534.756.200,00	534.756.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		678.248.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	4 Laporan	0,00	234.950.000,00	139.683.500,00	139.683.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			258.445.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	4 Laporan	0,00	381.639.200,00	395.072.700,00	395.072.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			419.803.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	12 Bulan	0,00	404.902.200,00	330.572.200,00	330.572.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Satuan Kerja Perangkat Daerah		445.392.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	2 Unit	0,00	203.780.000,00	203.780.000,00	203.780.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			224.158.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	4 Unit	0,00	201.122.200,00	126.792.200,00	126.792.200,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			221.234.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG di SKPD/ Lembaga/ Instansi di Kabupaten**				-	**92.8 74.04 21.10 Nilai Nilai %**	**0,00**	**1.328.695.100,00**	**1.422.986.500,00**	**1.461.564.610,00**							**1.461.564.610,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal Point dan anggaran Berbasis Gender				-	30 Perangkat Daerah	0,00	181.026.000,00	221.366.000,00	221.366.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Perangkat Daerah Kabupaten		199.128.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	30 Perangkat Daerah	0,00	119.106.000,00	143.736.000,00	143.736.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			131.016.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				-	4 Laporan	0,00	61.920.000,00	77.630.000,00	77.630.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			68.112.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan				-	15 Orang	0,00	1.147.669.100,00	1.201.620.500,00	1.201.620.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Perempuan Organisasi Kemasyarakatan		1.262.436.010,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	97.669.300,00	150.671.100,00	150.671.100,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			107.436.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Organisasi	0,00	1.049.999.800,00	1.050.749.400,00	1.050.749.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			1.154.999.780,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**				-	**100 %**	**0,00**	**141.829.300,00**	**168.973.200,00**	**156.012.230,00**							**156.012.230,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi				-	1 Dokumen	0,00	101.229.300,00	128.373.200,00	128.373.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Perempuan		111.352.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	12 Perangkat Daerah	0,00	101.229.300,00	128.373.200,00	128.373.200,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			111.352.230,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk*				-	100 %	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Perempuan Korban Kekerasan		44.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				-	6 Orang	0,00	40.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			44.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Umur Perkawinan Pertamanya Dibawah 18 Tahun**				**-**	**15,76 %**	**0,00**	**315.187.700,00**	**1.073.005.200,00**	**346.706.470,00**							**346.706.470,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)*				-	63 Nilai	0,00	128.113.400,00	830.700.900,00	830.700.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Kualitas Keluarga		140.924.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	128.113.400,00	830.700.900,00	830.700.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			140.924.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA*				-	82 Nilai	0,00	187.074.300,00	242.304.300,00	242.304.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Layanan bagi Keluarga		205.781.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	3 Layanan	0,00	187.074.300,00	242.304.300,00	242.304.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			205.781.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak**				**-**	**100 %**	**0,00**	**92.722.700,00**	**89.722.500,00**	**101.994.970,00**							**101.994.970,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan*				-	1 Buku	0,00	92.722.700,00	89.722.500,00	89.722.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Data Gender dan Anak		101.994.970,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	1 Dokumen	0,00	53.223.000,00	50.223.000,00	50.223.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			58.545.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	39.499.700,00	39.499.500,00	39.499.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			43.449.670,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**				**-**	**68.50 Nilai**	**0,00**	**358.175.600,00**	**481.163.400,00**	**393.993.160,00**							**393.993.160,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak*				-	100 %	0,00	170.949.000,00	260.769.000,00	260.769.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)		188.043.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				-	3 Organisasi	0,00	142.249.000,00	222.509.000,00	222.509.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			156.473.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	28.700.000,00	38.260.000,00	38.260.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			31.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapat penguatan*				-	100 %	0,00	187.226.600,00	220.394.400,00	220.394.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		205.949.260,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	300 Orang	0,00	41.960.400,00	58.938.800,00	58.938.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			46.156.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	45.559.000,00	62.898.400,00	62.898.400,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			50.114.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	41.959.000,00	41.959.000,00	41.959.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			46.154.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	57.748.200,00	56.598.200,00	56.598.200,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			63.523.020,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Mendapatkan Penanganan Secara Komprehensif**				**-**	**100 %**	**0,00**	**150.609.500,00**	**168.477.000,00**	**165.670.450,00**							**165.670.450,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah media massa yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak*				-	1 Laporan	0,00	36.160.000,00	43.530.000,00	43.530.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		39.776.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	300 Orang	0,00	36.160.000,00	43.530.000,00	43.530.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			39.776.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan minimal*				-	4 Lembaga	0,00	84.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Penyediaan Layanan bagi Anak		93.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				-	10 Orang	0,00	84.800.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			93.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan*				-	4 Lembaga	0,00	29.649.500,00	40.147.000,00	40.147.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	Lembaga Penyedia Layanan		32.614.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	100 Orang	0,00	29.649.500,00	40.147.000,00	40.147.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah			32.614.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**0,00**	**28.132.911.900,00**	**68.666.657.500,00**	**68.666.657.500,00**							**28.337.496.890,00**	
1.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Jumlah Kerjasama yang disepakati di pedesaan**				**-**	**1 kerjasama**	**0,00**	**15.807.473.800,00**	**36.313.953.300,00**	**15.807.473.800,00**							**15.807.473.800,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Persentase Desa yang memiliki Mou/kerjasama*				-	4 %	0,00	15.807.473.800,00	36.313.953.300,00	36.313.953.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kerja Sama Desa		15.807.473.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				-	1 Dokumen	0,00	15.807.473.800,00	36.313.953.300,00	36.313.953.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.807.473.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu**				-	**90 %**	**0,00**	**3.496.029.600,00**	**19.227.976.000,00**	**3.677.464.560,00**							**3.677.464.560,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase desa yang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik*				-	90 %	0,00	3.496.029.600,00	19.227.976.000,00	19.227.976.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PEMERINTAHAN DESA		3.677.464.560,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				-	154 Dokumen	0,00	1.681.680.000,00	1.678.000.000,00	1.678.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.681.680.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				-	154 Dokumen	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			37.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				-	154 Dokumen	0,00	255.500.000,00	3.416.620.000,00	3.416.620.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			281.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				-	4 Dokumen	0,00	766.699.900,00	9.603.187.500,00	9.603.187.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			843.369.890,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				-	153 Orang	0,00	96.000.000,00	3.287.880.000,00	3.287.880.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			105.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				-	1 Laporan	0,00	102.749.700,00	102.199.700,00	102.199.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.024.670,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				-	2 Dokumen	0,00	71.200.000,00	135.600.000,00	135.600.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			78.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				-	25 Desa	0,00	400.200.000,00	678.603.500,00	678.603.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			440.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				-	9 Dokumen	0,00	87.600.000,00	291.485.300,00	291.485.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			96.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang mendapatkan biaya operasional dan Persentase BUMDes yang berkembang**				-	**60 %**	**0,00**	**8.829.408.500,00**	**13.124.728.200,00**	**8.852.558.530,00**							**8.852.558.530,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Kompeten*				-	25 %	0,00	8.829.408.500,00	13.124.728.200,00	13.124.728.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		8.852.558.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	1 Lembaga	0,00	2.977.101.600,00	5.237.901.600,00	5.237.901.600,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.977.101.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				-	1 Dokumen	0,00	4.243.300.300,00	6.274.820.300,00	6.274.820.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.248.300.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				-	1 Laporan	0,00	181.500.300,00	184.500.300,00	184.500.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.650.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				-	5 Dokumen	0,00	1.427.506.300,00	1.427.506.000,00	1.427.506.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.427.506.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**0,00**	**6.446.670.100,00**	**13.717.256.050,00**	**13.717.256.050,00**							**10.139.847.980,00**	

Rekapitulasi Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Indeks Pembangunan Keluarga**				**-**	**60 Angka/ Nilai**	**0,00**	**4.075.120.800,00**	**7.026.285.800,00**	**6.475.590.570,00**							**6.475.590.570,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK*				-	1 Dokumen	0,00	932.175.500,00	946.636.500,00	946.636.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.599.313.980,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	223.175.700,00	223.415.200,00	223.415.200,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			387.634.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				-	2 Dokumen	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			228.563.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				-	8 Satuan Pendidikan	0,00	377.999.800,00	392.221.300,00	392.221.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			642.253.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				-	2 Organisasi	0,00	221.000.000,00	221.000.000,00	221.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			340.861.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*				-	100 Persen	0,00	3.142.945.300,00	6.079.649.300,00	6.079.649.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		4.876.276.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	12 Laporan	0,00	2.719.830.700,00	4.720.818.300,00	4.720.818.300,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			3.068.648.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				-	42 Unit	0,00	182.800.000,00	182.800.000,00	182.800.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			380.488.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				-	12 Laporan	0,00	240.314.600,00	1.176.031.000,00	1.176.031.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.427.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)**				**-**	**73 Persen**	**0,00**	**870.252.000,00**	**3.451.592.850,00**	**1.079.019.370,00**							**1.079.019.370,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase unmet need*				-	6,3 Persen	0,00	322.795.000,00	530.820.000,00	530.820.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		393.888.220,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	8 Laporan	0,00	252.000.000,00	354.150.000,00	354.150.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			280.720.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	7 Laporan	0,00	70.795.000,00	176.670.000,00	176.670.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			113.168.220,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan*				-	100 Persen	0,00	547.457.000,00	2.920.772.850,00	2.920.772.850,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		685.131.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	13 Laporan	0,00	37.250.000,00	56.700.950,00	56.700.950,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			116.589.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	110 Orang	0,00	175.818.000,00	276.489.000,00	276.489.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			199.999.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				-	39 Unit	0,00	0,00	2.241.944.000,00	2.241.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	13 Laporan	0,00	334.389.000,00	345.638.900,00	345.638.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			368.542.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)**				**-**	**19 Persen**	**0,00**	**1.501.297.300,00**	**3.239.377.400,00**	**2.585.238.040,00**							**2.585.238.040,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina*				-	19,8 Persen	0,00	109.243.700,00	373.543.700,00	373.543.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		161.551.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	10 Unit	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			86.097.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				-	20 Orang	0,00	21.157.900,00	97.957.900,00	97.957.900,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			33.511.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				-	165 Kelompok	0,00	36.085.800,00	223.585.800,00	223.585.800,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			41.943.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga*				-	100 Persen	0,00	1.392.053.600,00	2.865.833.700,00	2.865.833.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		2.423.686.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	4 Laporan	0,00	1.276.044.200,00	2.676.444.000,00	2.676.444.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.333.134.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	2 Organisasi	0,00	116.009.400,00	189.389.700,00	189.389.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			90.552.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**0,00**	**47.942.136.247,00**	**99.545.826.179,00**	**99.545.826.179,00**							**54.007.754.542,00**	